

**DINAMIKA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM MASA REFORMASI  
DI KOTA JAMBI 1999 DAN 2004**

**SKRIPSI**



**ZULFADHLI AL KAUTSAR**

**I1A120033**

**PROGRAM STUDI SEJARAH  
JURUSAN SEJARAH SENI DAN ARKEOLOGI  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS JAMBI**

**2025**

**DINAMIKA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM MASA REFORMASI  
DI KOTA JAMBI 1999 DAN 2004**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

**Universitas Jambi**

**guna Memenuhi sebagian Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana**

**Humaniora (S.Hum)**



**Oleh :**

**ZULFADHLI AL KAUTSAR**

**I1A120033**

**PROGRAM STUDI SEJARAH**

**JURUSAN SEJARAH SENI DAN ARKEOLOGI**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS JAMBI**

**2025**

## **MOTTO**

Takdir dibentuk oleh usaha, bukan hanya mimpi.

Tidak peduli seberapa sulit atau mustahil nya itu, jangan pernah melupakan tujuanmu  
(anonim)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan kepada orang tuaku tercinta yang selalu menjadi cahaya dalam setiap langkahku, kepada para dosen dan pembimbing yang telah menanamkan ilmu dan inspirasi, kepada teman-teman seperjuangan yang hadir dalam suka dan duka, kepada diriku sendiri atas usaha dan keteguhan hati yang tak pernah padam, serta kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah kekuatan, ketabahan, dan kesempatan yang tiada henti. Semoga setiap upaya ini menjadi secuil cahaya untuk perjalanan yang lebih panjang lagi.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan seksama. Tidak lupa Shalawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi kita semua yang telah menuntun kita ke arah perbaikan dan kemajuan sehingga kita dapat hidup dalam konteks beradab dan modern.

Skripsi yang berjudul: “Dinamika Pelaksanaan Pemilihan Umum Masa Reformasi Di Kota Jambi 1999 Dan 2004” yang dalam proses penyusunan dan penulisannya banyak ditemui berbagai hambatan dan rintangan. Skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan oleh penulis dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H selaku rektor Universitas Jambi
2. Bapak Prof. Dr. Supian, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi.
3. Ibu Dr. Dra. Irma Suryani, M.Pd. Selaku Ketua Jurusan Sejarah, Seni, dan Arkeologi.
4. Bapak Abd Rahman, S.Pd. M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Sejarah.
5. Bapak Irhas Fansuri Mursal. S.Pd., M.Hum selaku pembimbing skripsi I yang telah membekali saran serta masukan dalam proses pembuatan skripsi ini.
6. Ibuk Fatonah, S.S, M.I.Kom. selaku pembimbing skripsi II yang telah membekali saran dan masukan dalam pembuatan skripsi ini.
7. Tim penguji Bapak Abd Rahman, S.Pd. M.A selaku penguji I, Richad Saputra Adiguna, S.SOS., M.I.Kom selaku penguji II

8. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Sejarah yang telah banyak memberikan segudang ilmu pengetahuan dan pelajaran selama di bangku perkuliahan.
9. Seluruh Staf Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Staf Prodi Ilmu Sejarah yang telah membantu memfasilitasi dan memberikan layanan administrasi.
10. Terima kasih sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta, Maslamah yang tiada henti memberikan do'a dan restu, motivasi, dukungan, memberikan fasilitas terbaik, pendidikan terbaik, serta senantiasa sabar dalam mendidik dengan penuh cinta dan kasih sayang.
11. Terimakasih untk kakakku Muflihal Majdi dan adiku Syifa Fuadah Annajiyah yang selalu memberikan dukungan, do'a, cinta dan dukungan serta rela ikut bergadang dalam proses penulisan skripsi ini.
12. Rendi Deva Aditya, Rahmad Iqbal Maulana, Muhammad Irvan, Novian Dani, sebagai teman seperjuangan semasa kuliah yang telah mendukung dan memotivasi selama penyusunan skripsi
13. Teman-teman seperjuangan Ilmu Sejarah Angkatan 2020 yang sama-sama berjuang untuk memperoleh gelar S.Hum.

## DAFTAR ISI

MOTTO.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	viii
ABSTRAK .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Ruang Lingkup Penelitian .....	6
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Tinjauan Pustaka .....	7
1.6 Kerangka Konseptual .....	10
1.7 Metode Penelitian.....	12
1.8 Sistematika Penulisan .....	15
BAB II GAMBARAN POLITIK DI KOTA JAMBI .....	17
2.1 Kondisi Geografis Kota Jambi .....	17
2.2 Kondisi Masyarakat.....	19
2.3 Gambaran Politik di Kota Jambi.....	25
BAB III PELAKSANAAN PEMILU DI KOTA JAMBI 1999 dan 2004 .....	28

3.1 Persiapan Pemilihan Umum di Kota Jambi Masa Reformasi .....	28
3.2 Pelaksanaan Pemilihan Umum di Kota Jambi Masa Reformasi .....	32
3.3 Pemenang Pemilihan Umum di Kota Jambi Masa Reformasi .....	37
<b>BAB IV DINAMIKA PEMILU TAHUN 1999 DAN 2004 DI KOTA JAMBI .....</b>	<b>47</b>
4.1 Dinamika Pemilu 1999 di Kota Jambi.....	47
4.2 Dinamika Pemilu 2004 di Kota Jambi.....	52
4.3 Perbandingan dan Implikasi Dinamika Pemilu 1999 dan 2004 di Kota Jambi.....	60
0	
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
5.1 Kesimpulan .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>7</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah penduduk Kota Jambi Tahun 1999 dan 2004 .....	19
Tabel 2.2 Jumlah Pencari Kerja menurut Tingkat Pendidikan tahun 1994-2004.....	20
Tabel 2. 3 Distribusi Persentase aktivitas ekonomi penduduk di Kota Jambi sejak tahun 1990-an .....	22
Tabel 3. 1 Hasil Suara Pemilu Legislatif 1999.....	40
Tabel 3. 2 Hasil suara pemilu 2004 .....	44
Tabel 4. 1 Nama Partai dan Calon 2004 .....	56

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Kota Jambi .....	18
Gambar 3. 1 Pemberian hak suara secara langsung pada pemilu tahun 1999.....	30
Gambar 3. 2 Kondisi masyarakat Kota Jambi saat pemilihan umum berlangsung ....	33
Gambar 3. 3 Pemberian hak suara secara langsung pada pemilu tahun 2004.....	35
Gambar 4. 1 Strategi pengawasan keliling.....	53
Gambar 4. 2 Calon peserta DPD di Kota Jambi Sumber: KPU Batanghari .....	54

## ABSTRAK

Zulfadhli Al Kautsar. 2024. *Dinamika Pelaksanaan Pemilihan Umum Masa Reformasi Di Kota Jambi 1999 Dan 2004. Skripsi.* Program Studi Sejarah Jurusan Sejarah Seni Dan Arkeologi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi, Pembimbing : (I) Irhas Fansuri Mursal, S.Pd., M. Hum. (II) Fatonah, S.S, M.I.Kom.

Pemilihan umum bisa dilakukan secara demokratis di mana pemilih memilih pemimpin publik. Pemilihan diadakan terutama untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih perwakilan dan pemimpin yang akan mengambil keputusan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi Jambi pada awal reformasi, menyelesaikan pelaksanaan pemilu legislatif pada tahun 1999 dan 2004 di Kota Jambi, menganalisis dinamika pemilu pada tahun 1999 dan 2004 di Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang fokus pada pemahaman mendalam tentang Heuristik, Kritik Sumber Interpretasi, Historiografi Pendekatan ini menekankan pada data deskriptif, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen, yang tidak dapat diukur secara numerik. Hasil dari penelitian ini adalah 1.) kondisi politik di Jambi ditandai sistem otoritas ke sistem demokratis meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik, pelaksanaan pemilu legislatif mengalami perubahan signifikan menuju sistem demokrasi yang terbuka dan langsung, pemilu di Kota Jambi pada masa reformasi mencerminkan demokrasi inklusif menunjukkan perkembangan meningkatnya partisipasi politik masyarakat, penyelenggara pemilu, serta menguatnya peran media dan lembaga pengawas. 2.) Pemilu 1999 dan 2004 di Kota Jambi menandai babak baru demokrasi dengan pelaksanaan pemilihan langsung legislatif dan kepala daerah. Antusiasme masyarakat tinggi, ditunjukkan lewat partisipasi besar dan suasana TPS yang meriah. Isu utama yang diangkat meliputi pembangunan, infrastruktur, dan kesejahteraan rakyat. Panwaslu dan KIPP turut berperan penting dalam pengawasan demi pemilu yang jujur dan transparan. 3.) Pemilu 1999 menandai awal era reformasi dengan euforia demokrasi tinggi, diikuti 48 partai dan partisipasi besar masyarakat, termasuk di Kota Jambi yang menunjukkan antusiasme luar biasa. Sementara itu, Pemilu 2004 menghadirkan sistem yang lebih modern dan transparan, termasuk pemilihan presiden langsung untuk pertama kalinya dan penyaringan partai menjadi 24 peserta. Di Kota Jambi, meski berjalan aman, masih ditemukan pelanggaran administratif dan teknis pada

kedua pemilu tersebut. Keduanya mencerminkan dinamika transisi demokrasi dan tantangan dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.

Kata kunci: Pemilu, Reformasi, Kota Jambi, 1999, 2004.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemilihan umum berperan sebagai gerakan yang mengarah pada peristiwa dan perubahan penting. Sebagai realisasi dari sistem pemerintahan yang berdaulat pada rakyat, pemilihan umum melibatkan dinamika yang berhubungan dengan aspek politik, masyarakat, dan ekonomi. Dinamika ini tidak dapat dipisahkan dari proses pemilihan umum yang terjadi di Indonesia.<sup>1</sup>

Pemilihan umum bisa dilakukan secara demokratis di mana pemilih memilih pemimpin publik. Pemilihan diadakan terutama untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih perwakilan dan pemimpin yang akan mengambil keputusan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Ada berbagai jenis pemilihan di Indonesia, seperti: Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden: Memilih pemimpin masa depan bangsa, presiden dan wakil presiden. Pemilihan Legislatif: Memilih perwakilan masyarakat di tingkat federal, provinsi, dan lokal untuk duduk di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Pemilihan Kepala Daerah: Memilih walikota, gubernur, atau bupati untuk memimpin pemerintahan provinsi, kabupaten, atau kota.<sup>2</sup>

Pemilu dilakukan secara periodik serta berfungsi untuk memastikan adanya pergantian kekuasaan secara damai dan menyampaikan legitimasi kepada pejabat yang terpilih. Proses ini biasanya melibatkan pendaftaran pemilih, kampanye politik, pemungutan suara, dan penghitungan suara.<sup>3</sup>

Pemilihan legislatif di Indonesia dilaksanakan setiap lima tahun, bersamaan dengan Pemilihan Presiden. Prosesnya meliputi pemungutan suara untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pemungutan suara dilakukan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia (LUBER). Para pemilih

---

<sup>1</sup> Siti Zuhro, dkk. 2022. *Dinamika Demokrasi, Pemilu Dan Otonomi Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Leutika Prio), 11.

<sup>2</sup> Ibid., hlm 12

<sup>3</sup> Komisi Pemilihan Umum. 2019. Modul Pemilu di Indonesia (Jakarta: KPU RI), 1. [https://www.kpu.go.id/dmdocuments/modul\\_1c.pdf](https://www.kpu.go.id/dmdocuments/modul_1c.pdf) diakses pada tanggal 03 mei 2025.

memilih calon anggota legislatif dari partai politik yang mereka dukung, dan hasil pemilihan ditentukan berdasarkan suara terbanyak.<sup>4</sup>

Pada masa reformasi, Indonesia telah melaksanakan beberapa pemilihan umum.<sup>5</sup> Pemilu dianggap sebagai prasyarat utama dalam membangun sistem politik demokratis sesuai dengan Konstitusi selama era Orde Baru. Setelah periode tersebut, dua pemilu diadakan pada masa reformasi. Peralihan kekuasaan dari Soeharto yang mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 kepada B.J. Habibie mempercepat pelaksanaan pemilu tahun 1999. Pada 10 November 1998, Habibie bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri, yang menghasilkan Deklarasi Siganjul, menyatakan bahwa pemilu demokratis merupakan pilihan yang baik untuk mengakhiri pemerintahan transisi.<sup>6</sup>

Peristiwa reformasi tahun 1998 merupakan merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya suatu perubahan ke arah yang lebih baik secara konstitusional, sehingga ada perubahan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, aturan, dan budaya. Reformasi suatu proses ke arah tatanan kehidupan bernegara yang baik, yang mencakup aspek politik, aspek ekonomi, serta aturan. Reformasi pada Indonesia ialah suatu arah buat menata kembali kehidupan bernegara yang lebih baik, karena pada masa orba yang telah berkuasa selama 32 tahun mulai ringkih serta sudah tidak cocok lagi buat Indonesia.<sup>7</sup>

Kaum muda, terutama mahasiswa, memainkan peran penting dalam membentuk tuntutan reformasi yang diajukan oleh berbagai segmen masyarakat Indonesia. Mereka secara konsisten memperjuangkan perubahan pada struktur politik yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun. Puncak dari aktivitas ini terjadi

---

<sup>4</sup> Fiski Priyanti. 2005. Pelaksanaan Pemilihan umum di Indonesia. *Skripsi*. Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Negeri Semarang. Hlm 1

<sup>5</sup> Muhamad Hakiki. 2016. Islam dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim dan Perkembangannya di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 1 (1). 4-5

<sup>6</sup> Simamora, Janpatar, 2014. Menyongsong Rezim Pemilu Serentak, *Jurnal RechtsVinding*, 3 (1). 28-42

<sup>7</sup> Ikhsan Sirot & Hamdan Tri Atmaja. 2020. Reformasi Tahun 1998: Peranan Dan Dampaknya Bagi Kota Solo. *Journal Of Indonesian History* 9 (2). 102

pada tahun 1998 dengan gerakan mahasiswa di Indonesia, yang dianggap bersejarah karena berhasil memaksa Soeharto untuk mengundurkan diri pada 21 Mei 1998.<sup>8</sup>

Pengunduran diri Soeharto pada Mei 1998 menjadikan Habibie sebagai presiden baru Indonesia. Untuk mengatasi kendala dalam struktur politik dan ekonomi yang disebabkan oleh prinsip-prinsip Orde Baru, Habibie melaksanakan sejumlah reformasi penting. Salah satu langkah awal yang signifikan adalah memajukan tanggal pemilihan umum demokratis dari 1999 dan 2004, sehingga rakyat Indonesia dapat lebih cepat memilih pemimpin mereka secara langsung. Tujuan dari reformasi Habibie adalah untuk menyelesaikan krisis politik dan ekonomi serta mendorong transisi menuju sistem yang lebih demokratis dan inklusif.<sup>9</sup>

Penugasan Presiden Habibie kepada Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid untuk menyusun tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) di bidang politik merupakan langkah penting dalam reformasi politik. Ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk merubah struktur politik Indonesia. RUU tersebut meliputi:

1. RUU tentang pemilihan umum, yang bertujuan untuk membuat proses pemilihan lebih demokratis dan transparan.
2. RUU mengenai susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, yang mengatur struktur serta peran lembaga legislatif di Indonesia.
3. RUU tentang partai politik, yang bertujuan untuk mengatur organisasi, fungsi, dan peran partai politik dalam sistem politik Indonesia.

Upaya pemerintah Habibie untuk melibatkan pakar eksternal dalam penyusunan undang-undang terlihat dari pembentukan panel yang dipimpin oleh Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid, MA, yang terdiri dari tujuh anggota. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan undang-undang yang mengedepankan nilai-nilai keadilan dan demokrasi. Setelah era kepemimpinan otoriter Soeharto, tindakan ini merupakan

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 102

<sup>9</sup> Rozali Abdullah. 2009. *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*: Jakarta: Rajawali Press

bagian dari upaya yang lebih luas untuk membawa Indonesia menuju struktur pemerintahan yang lebih demokratis dan representatif.<sup>10</sup>

Pemilihan umum 2004 adalah pemilihan umum ke sembilan yang diadakan di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Pemilihan ini berlangsung secara demokratis, dengan dasar pelaksanaannya mengacu pada UU RI No. 12 Tahun 2003 tentang pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta UU RI No. 23 Tahun 2003 mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden.<sup>11</sup>

Pemilihan legislatif tahun 2004 tidak diadakan dengan cara yang sama seperti pemilu sebelumnya. Mekanisme pemilu yang tidak memenuhi harapan serta penyelenggara yang bersifat netral dan non-partisan mencerminkan adanya kontradiksi. Dalam kerangka sistem politik dan konstitusi yang baru, pemilu 2004 diawasi oleh pengawas independen yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat Indonesia.<sup>12</sup>

Dalam konteks politik pasca-reformasi, pemilihan umum memiliki peran krusial di tingkat lokal dan nasional di Provinsi Jambi. Setelah reformasi, terjadi kemajuan administratif dalam sistem pemerintahan daerah, terlihat dari peningkatan jumlah kabupaten dari 5 menjadi 9 kabupaten dan 1 kota. Partai Golkar, yang sering dianggap sebagai partai rezim Soeharto, mendominasi pemilihan di Jambi selama era Orde Baru dengan tingkat kemenangan sekitar 98%, menunjukkan adanya kontrol politik yang kuat dari pemerintah pusat. Namun, reformasi membawa perubahan signifikan dalam dinamika politik di Indonesia dan Jambi.<sup>13</sup>

Di Jambi, pemilihan umum tahun 2004 sangat signifikan karena untuk pertama kalinya anggota DPR, presiden, dan wakil presiden dipilih secara langsung. Partai baru PAN (Partai Amanat Nasional) berhasil menantang pemenang pemilu 1999 dengan mengangkat Drs. H. Rizal Djalil, M. sebagai ketua DPR Jambi. Di sisi lain, Drs. Antony Zedra Abidin dan Ismail Tajuddin dari Partai Golkar meraih 2 kursi,

---

<sup>10</sup> Jurdi, Fajlurrahman. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Hlm 34

<sup>11</sup> UU RI No. 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta UU RI No. 23 Tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden

<sup>12</sup> *Op. Cit.* Hlm 48

<sup>13</sup> Jambi Ekspres. *Kencah Politik Melayu Jambi*, edisi 18 Juli 1999. Hlm 3

sementara PDI (Partai Demokrasi Indonesia), PKS (Partai Keadilan Sejahtera), PPP (Partai Persatuan Pembangunan), dan Demokrat masing-masing memperoleh 1 kursi.<sup>14</sup>

Pemilihan umum di Kota Jambi telah menghadapi berbagai kesulitan sejak reformasi. Data dari Panitia Pengawas Pemilu (sekarang Bawaslu Kota Jambi) mencatat sekitar 200 kasus administrasi yang sedang ditangani, dengan satu kasus dilaporkan kepada penegak hukum. Selain itu, terdapat empat kasus terkait politik uang dan satu kasus yang berkaitan dengan netralitas pejabat.<sup>15</sup>

Intimidasi pemilih, pembelian suara, dan manipulasi suara adalah beberapa bentuk konflik yang muncul selama pemilihan umum 1999 di Jambi dan berbagai daerah lainnya di Indonesia. Di Jambi, terdapat laporan mengenai kecurangan, seperti ketidaksesuaian dalam daftar pemilih, di mana nama-nama fiktif ditambahkan dan pemilih yang sebenarnya dihapus untuk memanipulasi jumlah total suara. Selain itu, ada laporan tentang kekerasan dan intimidasi terhadap pemilih serta saksi partai politik. Diberitakan bahwa pemilih menerima uang atau barang sebagai imbalan untuk mendukung partai atau kandidat tertentu, yang menimbulkan masalah serius yang dikenal sebagai "politik uang." Selain itu, terdapat tuduhan mengenai manipulasi dalam perhitungan suara, termasuk pengalihan suara yang sah kepada partai tertentu atau perubahan jumlah suara selama proses rekapitulasi.<sup>16</sup>

Namun, pemilu 1999 dianggap sebagai momen penting dalam proses demokrasi di Indonesia. Untuk mengurangi kecurangan dan mencatat pelanggaran, berbagai lembaga independen dan organisasi non-pemerintah (LSM) dilibatkan dalam pemantauan pelaksanaan pemilu. Berbagai langkah diambil, termasuk memperkuat pengawasan, meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu, dan merombak sistem pemilu, untuk mengatasi masalah ini di masa mendatang. Selain itu, pengawasan independen dan keterlibatan masyarakat terus ditingkatkan untuk menciptakan pemilu yang lebih bersih dan adil.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Jambi Ekspres. Perhitungan Suara Pemilu 2004. Edisi 2004

<sup>15</sup> Jambi Independet. Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). 30 Oktober 1999.

<sup>16</sup> Wawancara. Wein Arifin (45 Tahun) Anggota Bawaslu Kota Jambi

<sup>17</sup> Wawancara. Wein Arifin (45 Tahun) Anggota Bawaslu Kota Jambi

a. lembaga independen yang ada di Jambi:

1. Pwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) Lembaga pengawas resmi yang di bentuk oleh pemerintah untuk mengawasi jalannya pemilu.
2. KPUD (Koimisi Pemilihan Umum Daerah) Jambi Sebagai penyelenggara pemilu di tingkat daerah, KPUD bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis pemilu, mulai dari pendataan pemilih hingga penghitungan suara.

b. Organisasi non pemerintah yang ada di Jambi:

1. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) sering terlibat dalam memperjuangkan hak-hak rakyat, menyuarkan kebutuhan masyarakat yang kurang terwakili, dan mengedukasi publik tentang isu-isu penting.
2. Pers dan Media Lokal Surat kabar seperti Jambi Ekspres, Tribun Jambi, dan radio lokal ikut menyuarkan berbagai temuan pelanggaran atau ketidaksesuaian selama pemilu berlangsung.

Berdasarkan uraian diatas menjadikan daya tarik untuk meneliti kehidupan di Jambi pada era kontemporer. Kajian sejarah politik merupakan kajian yang amat menarik , karena sejarah politik adalah sejarah yang mudah diingat terutama peristiwa besar seperti pemilu. Dengan demikian menjadi daya tarik penulis untuk melihat dan mengkaji lebih lanjut pemilihan umum di Jambi pada periode 1999 dan 2004.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Kondisi politik Jambi awal Reformasi ?
2. Bagaimana Pelaksanaan pemilu legislatif masa reformasi 1999 dan 2004 di kota Jambi ?
3. Bagaimana dinamika pemilu tahun 1999 dan 2004 di kota Jambi ?

## **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Salah satu ciri penting dari penelitian kajian sejarah adalah adanya ruang dan lingkup penelitian. Pelingkupan dan penentuan ruang ini bertujuan agar penelitian tetap fokus dan tidak meluas ke area yang tidak relevan, meskipun mungkin akan sedikit menyentuh aspek di luar topik utama. Ruang spasial penelitian ini adalah Kota Jambi, dengan batasan temporal pada tahun 1999 dan 2004. Tahun 1999 dipilih karena merupakan tahun pemilihan umum di masa reformasi, sementara tahun 2004 dipilih sebagai batas akhir karena merupakan pemilihan umum yang pertama kali memilih presiden dan wakil presiden, dan pemilihan legislatif DPR, DPRD secara langsung sejak Indonesia berdiri.

#### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kondisi Politik Jambi pada awal reformasi.
2. Menyelesaikan pelaksanaan pemilu legislatif pada tahun 1999 dan 2004 di Kota Jambi.
3. Menganalisis dinamika pemilu pada tahun 1999 dan 2004 di Kota Jambi.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan:

1. Memberikan bahan dan referensi untuk penulisan sejarah Jambi selanjutnya, khususnya mengenai pemilihan umum di kota Jambi.
2. Menjadi acuan bagi pemerintahan Kota Jambi dalam menelusuri perkembangan dinamika politik di daerah tersebut.
3. Menjadi referensi bagi masyarakat untuk mengenal khazanah sejarah di Kota Jambi.

#### **1.5 Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka berfungsi sebagai referensi dasar dalam melakukan penelitian. Selain itu, tinjauan ini juga bertujuan untuk menghindari plagiasi dalam penulisan

sejarah. Beberapa sumber yang relevan mengenai sejarah pemilihan umum antara lain adalah buku, skripsi, dan jurnal yang membahas topik tersebut.:

Pertama, kajian pemilihan umum di Kota Jambi sudah dikaji oleh Rima Fitriana 2021 dengan judul Strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Jambi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Ditengah Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pemilihan Gubernur Tahun 2020 Di Kota Jambi).<sup>18</sup> Skripsi ini banyak membahas pelaksanaan pemilu dikota Jambi. Walaupun tidak dari sudut pandang sejarah namun skripsi ini sangat membantu dalam melihat aspek aspek pemilu di Kota Jambi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni penelitian penulis membahas pemilu di kota Jambi dari sudut pandang sejarah. Sedangkan Tulisan ini membahas partisipasi pemilu akibat wabah. Persamaan yakni sama sama membahas spasial penelitian di Kota Jambi.

Kedua, Edwina Putri 2018 dengan skripsi Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Walikota Jambi Tahun 2018. Skripsi ini membahas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi memberikan fasilitas dan memantau situasi politik yang sedang berlangsung serta bekerjasama dengan KPU Kota Jambi untuk mendata masyarakat yang belum terdaftar di DPT, sehingga meminimalisir masyarakat yang tidak bisa memilih karena tidak terdaftar. Namun dalam hal ini masih terdapat beberapa hambatan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu kurangnya dana, kurangnya perhatian masyarakat dan laporan yang terlambat masuk sehingga hal ini menjadi suatu kendala yang membuat proses pendidikan politik tidak maksimal.<sup>19</sup> Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penulitn penulis yakni pada pokok bahasan yang dikaji. Sedangkan persamaan terletak pad spasial penelitian.

Ketiga, sebuah skripsi Fiska Friyanti 2018 yang berjudul “Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Dalam Sejarah Nasional.” Dalam tulisan ini, penulis

---

<sup>18</sup> Rima Fitriana. 2021. Strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Jambi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Ditengah Pandemi Covid – 19 (Studi Kasus Pemilihan Gubernur Tahun 2020 Di Kota Jambi). *Skripsi* Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jambi.

<sup>19</sup> Edwina Putri. 2018. Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Walikota Jambi Tahun 2018. *Skripsi*. Universitas Jambi.

membahas sejarah perkembangan pemilihan umum di Indonesia, meliputi pemilihan pada masa Orde Lama (1955), masa Orde Baru (1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997), serta masa Reformasi (1999 dan 2004). Skripsi ini mencerminkan dinamika dan perubahan dalam pemilihan umum dari waktu ke waktu serta membandingkan proses pemilihan dari berbagai periode. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada konteks sejarah politik yang dibahas dan perkembangannya. Namun, perbedaan utama antara keduanya adalah cakupan kajian; skripsi ini mencakup sejarah pemilihan umum yang lebih luas dan temporal yang lebih panjang, sedangkan penulis fokus pada era Orde Baru. Selain itu, perbedaan juga terlihat dalam aspek spasial, di mana skripsi ini bersifat nasional, sedangkan penulis terbatas pada cakupan Kota Jambi.<sup>20</sup>

Keempat, tulisan Joevano, dkk 2022 dengan judul Penerapan Pemilu di Indonesia Masa Reformasi<sup>21</sup> Dalam tulisan ini, dibahas mengenai penerapan pemilu di Indonesia pada masa reformasi, yaitu pemilu 1999 dan 2004. Pelaksanaan pemilu pada periode ini memberikan warna baru dalam demokrasi elektoral di Indonesia, terutama dengan munculnya partai-partai politik baru yang sangat antusias untuk berpartisipasi dalam arena politik. Sebanyak 48 partai politik ikut berkontestasi dalam pemilu. Pemilu 1999 sering disebut sebagai pemilu transisi untuk menciptakan pemilu yang demokratis. Penyelenggaraan pemilu ini juga berlangsung dalam waktu singkat, yaitu kurang dari 5 bulan. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yakni pada spasial penelitian sedangkan persamaannya terdapat pada temporal yang masa reormasi.

Kelima, tulisan Muhammad Afied 2014 Hambali dalam skripsinya membahas pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengatasi berbagai persoalan dan penyelewengan dalam proses seperti pemilu pasca-reformasi. Skripsi ini menyoroti aspek partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokratisasi. Kesamaan dengan skripsi penulis terletak pada fokus pembahasan mengenai pemilu pasca-reformasi,

---

<sup>20</sup> Fiska Friyanti. 2018. Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Dalam Sejarah Nasional. *Skripsi. Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.*

<sup>21</sup> Jovano. Dkk. 2022. Penerapan Pemilu di Indonesia Masa Reformasi. *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 9 (2) (2022): 502, doi: /10.37304/wacana.v9i2.7766

yang menunjukkan bahwa kedua penelitian memperhatikan perkembangan politik di Indonesia setelah reformasi, khususnya dalam konteks pemilihan umum. Meskipun periode waktu yang berbeda memberikan kerangka analisis yang berbeda, fokus pada pemilu pasca-reformasi tetap menjadi inti dari kedua penelitian tersebut.<sup>22</sup> Adapun persamaan dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas pemilu pasca reformasi. Namun dalam tempo waktu berbeda dalam tulisan ini hanya sebatas 2002 sedangkan penulis menggunakan priode 1999 dan 2004.

Keenam, Ismail yang berjudul *Yuridis Sistem Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pada Era Orde Baru Dengan Era Reformasi* sistem pemilu yang digunakan pada Era Orde Baru adalah sistem proporsional dengan sistem daftar tertutup. Dalam sistem ini, pemilih memberikan suaranya kepada partai politik, dan partai politik kemudian menentukan calon-calon yang akan menduduki kursi berdasarkan urutan dalam daftar calon yang telah disusun sebelumnya oleh partai. Sistem ini memberikan kendali yang besar kepada partai politik dalam menentukan siapa yang akan menjadi wakil rakyat, sementara pemilih memiliki keterbatasan informasi tentang calon-calon individu yang akan mereka dukung. Hal ini dapat mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi dalam pemilihan, serta membatasi kebebasan pemilih untuk memilih secara langsung calon yang mereka anggap paling layak.<sup>23</sup> Skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas sejarah pemilihan umum, namun memiliki perbedaa terkait dengan spasial dan priodisasi penelitian.

## **1.6 Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual berfungsi sebagai dasar berpikir dalam penelitian sejarah politik, khususnya dalam menganalisis pelaksanaan pemilu di Kota Jambi pada masa Reformasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah dengan menyoroti

---

<sup>22</sup> Muhammad Afied Hambali. 2014. *Pemilukada Pasca Reformasi Di Indonesia*. *Journal : Rechstaat Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unsa*. 8 (1).

<sup>23</sup> Ismail. *Yuridis*. 2015. *Sistem Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pada Era Orde Baru Dengan Era Reformasi*. *Jurnal. JOM Fakultas Hukum Vol II* (2).

dinamika politik lokal sebagai bagian dari proses demokratisasi pasca-Orde Baru. Dengan pendekatan ini, penulis mengkaji peristiwa politik secara kronologis dan menganalisis perubahannya melalui kacamata teori politik. Teori digunakan untuk membingkai sekaligus mengarahkan pemahaman terhadap data yang ditemukan di lapangan.

Dalam konteks ini, teori politik menjadi penting karena memiliki dua fungsi utama. Pertama, teori politik berperan sebagai dasar normatif dalam membentuk perilaku politik yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Kedua, teori ini juga berfungsi sebagai alat analisis dalam memahami fenomena politik, seperti proses pemilu dan dinamika kekuasaan. Melalui analisis teori politik, peneliti dapat menarik generalisasi dari peristiwa-peristiwa politik yang terjadi dan memahaminya dalam konteks perubahan sistem pemerintahan.<sup>24</sup>

Dinamika politik sendiri dipahami sebagai interaksi kompleks antara aktor politik, lembaga, dan masyarakat yang saling memengaruhi dan berubah secara terus-menerus. Dalam suatu sistem politik yang dinamis, perubahan pada satu komponen akan berdampak pada komponen lainnya. Konsep ini mencakup aspek perubahan sistem kekuasaan, prosedur pemilu, partisipasi masyarakat, dan regulasi politik. Dinamika politik lokal di Kota Jambi menjadi cerminan dari perubahan yang lebih besar di tingkat nasional pada masa reformasi.<sup>25</sup>

Politik, secara umum, sering dipandang negatif karena identik dengan perebutan kekuasaan. Namun, sesungguhnya politik adalah wadah penting dalam menentukan arah dan kebijakan negara. Dalam konteks demokrasi, politik bukan sekadar persaingan kekuasaan, tetapi juga mencerminkan hubungan antara negara dan masyarakat. Bentuk partisipasi seperti keterlibatan publik dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan pemilu merupakan wujud nyata dari interaksi tersebut.<sup>26</sup>

Salah satu bentuk nyata keterlibatan masyarakat dalam proses politik adalah melalui pemilu. Pemilu merupakan mekanisme formal untuk mewujudkan kedaulatan

---

<sup>24</sup> Susilastuti, dkk. 2016. *Pengantar Ilmu Politik Membedah Paradigma Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Pembangunan (UPN), Hlm 1

<sup>25</sup> R. Siti Zuhro, dkk. *Model Demokrasi Lokal*. Jakarta: PT THC Mandiri, 2011, hlm. 10–11.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

rakyat. Menurut Ali Moertopo, pemilu adalah sarana rakyat untuk mengekspresikan kehendak politiknya sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Meskipun pemilu presiden langsung baru dilaksanakan pada 2004, pemilihan legislatif telah berlangsung di Kota Jambi sejak 1999 dan menjadi bagian dari agenda demokratisasi nasional.<sup>27</sup>

Sebagai bagian dari sistem politik yang demokratis, pemilu membutuhkan institusi penyelenggara yang kredibel dan independen. Dalam konteks ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memegang peranan penting. KPU bertugas menyelenggarakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bawaslu berperan dalam mengawasi seluruh tahapan pemilu untuk memastikan integritas proses demokrasi berjalan dengan baik, termasuk di tingkat lokal seperti Kota Jambi.<sup>28</sup>

Reformasi 1998 menjadi tonggak penting dalam perjalanan politik Indonesia. Reformasi berarti upaya untuk membentuk kembali sistem politik dan birokrasi agar lebih demokratis dan akuntabel. Dalam kerangka ini, reformasi ditujukan untuk menghapus praktik otoritarian, membuka ruang partisipasi publik, serta memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan efektif. Sistem dan struktur pemilu pun mengalami perubahan besar, termasuk pelibatan masyarakat sipil yang lebih luas dalam proses politik.<sup>29</sup>

Dengan memadukan pendekatan sejarah dan teori politik serta mengkaji peran lembaga pemilu, masyarakat, dan institusi pengawasan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan pemilu tahun 1999 dan 2004 di Kota Jambi. Kerangka konseptual ini menjadi dasar dalam menganalisis perubahan politik lokal pada masa transisi demokrasi dan memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang konsolidasi demokrasi di tingkat daerah.

## **1.7 Metode Penelitian**

---

<sup>27</sup> Soemardjan, Selo. *Menuju Tata Indonesia Baru*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000, hlm. 7.

<sup>28</sup> Ibid., hlm. 60.

<sup>29</sup> Dwiyanto, A., dkk. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2002, hlm. 12.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian sejarah. Metode sejarah adalah sekumpulan pedoman dan praktik terstruktur untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan sejarah primer, sebagian besar di antaranya telah dipublikasikan. Pendekatan ini sangat penting untuk memperoleh objek penelitian, dapat dipahami sebagai cara yang terencana dan sistematis untuk melakukan tugas. Penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis menurut Kuntowijoyo, yang memiliki empat tahapan: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.<sup>30</sup>

### **1. Heuristik**

Secara terminologi, heuristik berasal dari bahasa Yunani *heuriskein* yang berarti mencari atau menemukan. Dalam penelitian sejarah, heuristik merujuk pada tahap awal dalam metode historis, yaitu kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengidentifikasi sumber-sumber sejarah yang relevan. Tahapan ini sangat penting karena kualitas dan validitas data yang diperoleh akan memengaruhi hasil analisis historis selanjutnya. Sumber sejarah yang dikumpulkan terbagi ke dalam dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

#### **a. Sumber Primer**

Sumber primer merupakan sumber yang berasal langsung dari pelaku, saksi hidup, atau individu yang hidup sezaman dengan peristiwa yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber primer berupa wawancara langsung dengan mantan penyelenggara pemilu, tokoh partai politik lokal, dan masyarakat yang ikut serta dalam pemilu 1999 dan 2004 di Kota Jambi. Selain itu, penulis juga menggunakan dokumen-dokumen resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota

---

<sup>30</sup> Kunto wijoyo. 2005. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang. Hlm 90

Jambi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu, seperti hasil rekapitulasi suara, daftar calon tetap (DCT), dan dokumentasi internal lainnya.

#### b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak diperoleh langsung dari pelaku sejarah atau saksi mata, namun tetap berfungsi mendukung analisis dan memperkuat narasi historis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai referensi sekunder seperti buku, jurnal, skripsi terdahulu, artikel ilmiah, dan publikasi lainnya yang membahas konteks politik dan pemilu pada masa reformasi. Sumber-sumber ini diperoleh dari perpustakaan Universitas Jambi, perpustakaan daerah, serta platform digital seperti Google Scholar dan situs resmi Komisi Pemilihan Umum. Penulis juga menggunakan artikel dari surat kabar lokal seperti Jambi Ekspres, Jambi News, dan Berita Yudha sebagai bahan tambahan untuk melihat perkembangan opini publik dan pemberitaan politik pada masa tersebut.

### **2. Kritik Sumber**

Untuk membandingkan data yang diperoleh selama tahap heuristik, dilakukan kritik sumber. Tujuan dari kritik sumber ini adalah untuk mengumpulkan data yang relevan. Dengan membandingkan sumber referensi seperti yang ditemukan secara daring dan di surat kabar kritik ekstern dapat dilakukan untuk menentukan apakah ada perubahan dan seberapa besar perubahan tersebut. Terhadap Dinamika pelaksanaan Pemilihan Umum Masa Reformasi di Kota Jambi 1999 dan 2004.

### **3. Interpretasi**

Tujuan dari interpretasi adalah untuk menentukan seberapa erat hubungan antara fakta dan data. Diharapkan keduanya dapat menjelaskan satu peristiwa dengan yang lainnya secara kronologis. Untuk merumuskan pernyataan yang ringkas dan mudah dipahami, yang memungkinkan penarikan kesimpulan yang tepat, peneliti menganalisis fakta dan data selama proses interpretasi. Dalam penelitian ini diharapkan mendapat kejelasan Mendapat kejelasan antara fakta dan nyata dinamika pelaksanaan pemilihan umum masa reformasi di Kota Jambi 1999 dan 2004.

#### **4. Historiografi**

Proses pengaturan dan penyajian sejarah dengan menggunakan pemikiran serta analisis literatur dari berbagai sumber dikenal sebagai historiografi. Tujuan dari historiografi adalah menyajikan peristiwa sejarah dengan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Penulis berusaha menyusun cerita menurut peristiwa berdasarkan kronologi dan agar dapat menghubungkan peristiwa-peristiwa yang terpisah menjadi rangkaian peristiwa yang masuk akal dalam mendekati kebenaran. Dalam penelitian ini ditulis dan disajikan sesuai dengan kebenaran data terhadap dinamika pelaksanaan pemilihan umum masa reformasi di Kota Jambi 1999 dan 2004.

#### **1.8 Sistematika Penulisan**

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Demokrasi di Kota Jambi 1999 dan 2004” akan di paparkan melalui penulisan sistematika dibawah ini:

BAB I PENDAHULUAN dalam bab ini memaparkan proposal skripsi yakni latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metode dan sistematika penelitian.

BAB II GAMBARAN POLITIK DI KOTA JAMBI pada bab ini akan membahas politik secara umum di kota Jambi.

BAB III PELAKSANAAN PEMILU DI KOTA JAMBI 1999 dan 2004 dalam bab ini akan melihat bagaimana pemilihan umum di kota Jambi pada masa reformasi meliputi persiapan, pelaksanaan dan kontestan pemenang pemilu di kota Jambi.

BAB IV DINAMIKA PEMILU TAHUN 1999 DAN 2004 di kota Jambi dalam bab ini akan membahas lebih lanjut pemilihan legislatif secara langsung di kota Jambi persiapan, pelaksanaan dan kontestan pemenang pemilu di kota Jambi.

BAB V PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN POLITIK DI KOTA JAMBI**

#### **2.1 Kondisi Geografis Kota Jambi**

Kota Jambi adalah ibu kota Provinsi Jambi di Pulau Sumatra, dengan luas wilayah sekitar 205,38 km<sup>2</sup> dan populasi mencapai 641.022 jiwa pada tahun 2024. Kota ini terbelah oleh Sungai Batanghari, sungai terpanjang di Sumatra, yang menghubungkan dua kawasan utama melalui Jembatan Gentala Arasy, jembatan pedestrian berbentuk S pertama di Indonesia. Kota Jambi dikelilingi oleh Kabupaten Muaro Jambi dan memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan budaya.<sup>31</sup>

Kota Jambi secara geografis berada di wilayah beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi, yang mendukung pertumbuhan vegetasi yang subur di sekitarnya. Namun, beberapa wilayahnya, seperti Telanaipura, Pasar Jambi, dan Jambi Timur, termasuk daerah rawan bencana, terutama banjir.<sup>32</sup>

Secara geomorfologis Kota Jambi terletak di bagian barat cekungan Sumatera bagian selatan yang disebut sub-cekungan Jambi dimana merupakan daratan rendah di Pulau Sumatera bagian timur. Dari topografinya, Kota Jambi relative datar dengan ketinggian 0-60 mdpl. Bagian bergelombang terdapat di utara dan selatan kota, sedangkan daerah rawa terdapat di sekitar aliran sungai Batanghari. Batanghari merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatera dengan panjang keseluruhan ± 1.700 km dengan lebar sungai rata-rata sekitar 500 m. Sungai ini berhulu pada Sungai Diatas yang terletak di Provinsi Sumatera Barat dan bermuara di pesisir timur Pulau

---

<sup>31</sup> Anonim, BPS Kota Jambi Dalam Angka Tahun 1999. Hlm 12, <https://jambi.bps.go.id/id/publication/2011/02/21/492a65707bd8ac222aba52fb/jambi-dalam-angka-1999.html> diakses pada tanggal 03 mei 2025

<sup>32</sup> Anonim, BPS Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2004. Hlm 40, <https://jambikota.bps.go.id/id/publication/2009/08/06/3214298f76f33701c9c6aae7/kota-jambi-dalam-angka-2004.html> diakses pada tanggal 03 mei 2025

Sumatera pada kawasan selat Berhala. Sungai Batanghari membelah wilayah Kota Jambi menjadi dua bagian yaitu sisi Utara dan Selatan.<sup>33</sup>

Secara geografis, titik koordinat Kota Jambi terletak diantara 103°30'1,67'' 103°40'0,22'' BT dan 01°30'2,98'' - 01°40'1,07'' LS.<sup>34</sup> Dari sisi iklim Kota Jambi beriklim tropis dengan suhu minimum berkisar antara 22,1 – 23,3°C dan suhu maksimum antara 30,8 – 32,6°C dengan kelembaban udara antara 82 – 87%. Untuk curah hujan terjadi sepanjang tahun sebesar 2.296 mm/tahun dengan rata-rata 191,34 mm/tahun. Musim penghujan terjadi antara bulan Oktober – Maret dengan rata-rata 20 hari/bulan, sedangkan musim kemarau terjadi antara April – September dengan rata-rata 16 hari hujan/bulan. Koordinat tersebut menunjukkan keberadaan Kota Jambi yang terletak di tengah-tengah Pulau Sumatera.<sup>35</sup> Untuk pola penggunaan tanahnya dapat dikelompokkan menjadi bagian, yaitu : Tanah Sawah 1.601 Ha, Tanah Ladang 1.190 Ha, Tanah Kebun 3.039 Ha, Tanah Perkarangan 9.171 Ha dan tanah untuk penggunaan lainnya seluas 5.000 Ha.<sup>36</sup>

**Gambar 2. 1 Peta Kota Jambi**

---

<sup>33</sup> Drs.H.Junaidi.T.Noor.MM. *Sejarah Kota Jambi - Pemerintah Kota Jambi*, diakses pada tanggal 15 November 2024 ([jambikota.go.id](http://jambikota.go.id))

<sup>34</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi 2016-2021, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 tahun 2016

<sup>35</sup> Mustari Irawan, *Op.,cit.* hal. 6

<sup>36</sup> Dewi Fitriani, *Op.,cit.* hal. 23

## PETA KOTA JAMBI



Sumber: <https://www.lamudi.co.id/peta-kota-jambi>

## 2.2 Kondisi Masyarakat

### a. Demografi atau Penduduk

Demografi berasal dari kata *demos* yang berarti penduduk dan *grafein* yang berarti gambaran. Jadi demografi adalah ilmu yang mempelajari penduduk. Philip M. Hauser dan Dudley Duncan (1959) mendefinisikan bahwa demografi adalah ilmu yang mempelajari jumlah, persebaran, teritorial dan komposisi penduduk.<sup>37</sup> Kota Jambi berada pada ketinggian rata-rata 10 sampai 60 meter di atas permukaan laut. Dengan luas 205,38 Km yang terdiri dari 11 Kecamatan dan 62 Kelurahan. Distribusi penduduk Provinsi Jambi Tahun 1999 menurut kabupaten/Kota.

<sup>37</sup> Sonny Harry B. Harmadi, *Modul Pengantar Demografi* diakses pada <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ESPA4535-M1.pdf>

**Tabel 2. 1 Jumlah penduduk Kota Jambi Tahun 1999 dan 2004**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	
		Tahun 1999	Tahun 2004
1.	Telanaipura	93.654	75.671
2.	Kota Baru	64.521	89.773
3.	Jambi Selatan	88.096	94.743
4.	Jambi Timur	94.961	77.242
5.	Pasar Jambi	21.803	14.429
6.	Danau Teluk	14.472	11.663
7.	Pelayangan	16.667	12.958
8.	Jelutung	72.691	60.060

Sumber: Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi Tahun 1999 dan 2004

Berdasarkan tabel di atas, Pada tahun 1999, jumlah penduduk Kecamatan Tekanaipura mencapai 93.654 jiwa, sedangkan pada tahun 2004 menurun menjadi 75.671 jiwa. Kecamatan Kota Baru mengalami peningkatan jumlah penduduk dari 64.521 jiwa pada tahun 1999 menjadi 89.773 jiwa pada tahun 2004. Sementara itu, Kecamatan Jambi Selatan juga menunjukkan peningkatan, dari 88.096 jiwa pada tahun 1999 menjadi 94.743 jiwa pada tahun 2004. Namun, Kecamatan Jambi Timur mengalami penurunan jumlah penduduk dari 94.961 jiwa pada tahun 1999 menjadi 77.242 jiwa pada tahun 2004. Kecamatan Pasar Jambi, Danau Teluk, dan Pelayangan juga mengalami penurunan, dengan jumlah penduduk masing-masing menjadi 14.429 jiwa, 11.663 jiwa, dan 12.958 jiwa pada tahun 2004. Terakhir, Kecamatan Jelutung menunjukkan penurunan dari 72.691 jiwa pada tahun 1999 menjadi 60.060 jiwa pada tahun 2004.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid*

**Tabel 2.2 Jumlah Pencari Kerja menurut Tingkat Pendidikan tahun 1994-2004**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pendidikan	
		Tahun 1999	Tahun 2004
1.	SD/Tidak Tamat SD	343	124
2.	SMP Sederajat	923	1.022
3.	SMA Sederajat	3.755	22.698
4.	Sarjana	1.233	10.496
Jumlah		6.254	34.340

Sumber: Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi Tahun 1999 dan 2004

Berdasarkan Tabel diatas, menunjukkan perkembangan tingkat pendidikan penduduk Kota Jambi antara tahun 1999 dan 2004. Secara umum, terjadi peningkatan yang sangat signifikan dalam jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan di semua jenjang, terutama pada tingkat pendidikan menengah dan tinggi. Pada tahun 1999, jumlah penduduk yang hanya berpendidikan SD atau tidak tamat SD masih tercatat sebanyak 343 orang. Namun, angka ini menurun drastis menjadi hanya 124 orang pada tahun 2004, menunjukkan adanya perbaikan akses terhadap pendidikan dasar. Sementara itu, jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan pada jenjang SMP meningkat dari 923 orang menjadi 1.022 orang. Lonjakan tertinggi terjadi pada jenjang SMA, dari 3.755 orang menjadi 22.698 orang. Hal ini menandakan bahwa semakin banyak masyarakat yang melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah atas. Kemajuan paling mencolok terlihat pada jenjang pendidikan sarjana. Dari hanya 1.233 orang pada tahun 1999, jumlah lulusan sarjana melonjak menjadi 10.496 orang dalam lima tahun, mencerminkan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya pendidikan tinggi di kalangan masyarakat Kota Jambi.

### **c. Ekonomi**

Perekonomian masyarakat Jambi pada mulanya masih tergantung pada usaha yang bersifat tradisional. Usaha ini berfokus pada sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan dengan memanfaatkan sumber daya hutan yang tumbuh secara alami. Kegiatan operasional dilakukan menggunakan peralatan sederhana serta mengandalkan tenaga manusia sebagai modal utama. Pada periode berikutnya, perekonomian masyarakat Jambi mengalami perkembangan dengan beralih menuju usaha perkebunan karet yang bersifat komersil dan perdagangan yang sebelumnya memanfaatkan hasil hutan yang secara alamiah tumbuh beralih ke perdagangan karet.<sup>39</sup> Selanjutnya, pada periode 1970-an perekonomian masyarakat Jambi kembali beralih pada sektor pertanian dimana hal tersebut dapat dilihat pada masa repelita yang mulai mencanangkan pengembangan pembangunan di segala bidang dengan menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan.<sup>40</sup> Selain itu pada masa ini bidang perdagangan juga menunjukkan kemajuan terutama pada ekspor hasil kayu dimana ekspor hasil kayu dari tahun 1969-1971 hanya tercatat sebesar 1,60% akan tetapi pada tahun 1976 telah mengalami peningkatan menjadi 57,75%.<sup>41</sup>

Memasuki dekade 1980-an, terjadi pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor pertanian ke sektor nonpertanian. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan beras di Kota Jambi, pemerintah daerah harus mengandalkannya dari wilayah Tingkat II seperti Tanjung Jabung dan Kerinci. Selanjutnya, pada awal tahun 1990-an, perekonomian Kota Jambi mulai didominasi oleh sektor tersier.<sup>42</sup> Lihat Tabel 6 berikut :

**Tabel 2. 3 Distribusi Persentase aktivitas ekonomi penduduk di Kota Jambi sejak tahun 1990-an**

No	Sektor Ekonomi	Persentase (%)

<sup>39</sup> Hartono Margono, Mujilan dan J.R. Chaniago, *Sejarah Sosial Jambi : Jambi sebagai Kota Dagang*, Jakarta : Depdikbud (1984)

<sup>40</sup> Siti Heidi Karmela, *Kehidupan Ekonomi Penduduk Dalam Setiap Periodisasi Sejarah Jambi, Jurnal Ilmiah Dikdaya*, Vol. 4, No. 01 (2015)

<sup>41</sup> Hartono Margono, Mujilan dan J.R. Chaniago, *Op.,cit.* hal. 99

<sup>42</sup> Siti Heidi Karmela, *Op.,cit.*

1	Perdagangan, Hotel, Restoran	21,95%
2	Industri	18,97%
3	Transportasi/Pengangkutan	18,90%
4	Jasa	15,78%
5	Keuangan	7,91%
6	Pertambangan dan Penggalian	7,82%
7	Bangunan	4,17%
8	Pertanian	2,58%
9	Listrik, Gas dan Air Bersih	1,93%
Jumlah		100%

Sumber: BPS Kota Jambi Dalam Angka Tahun 1999

Berdasarkan tabel diatas, Penduduk Kota Jambi mayoritas terlibat dalam sektor perdagangan, industri, serta transportasi atau angkutan. Sementara itu, sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan tidak lagi menjadi sektor dominan. Perdagangan di Kota Jambi berkembang pesat berkat lokasinya yang strategis, yaitu berada di antara kota-kota besar seperti Riau, Padang, Palembang, serta berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan, yang mendukung pertumbuhan perdagangan lokal. Selain itu, Kota Jambi juga berfungsi sebagai pusat perdagangan regional yang

menghubungkan Batam, Singapura, dan Johor, serta berperan penting dalam kerjasama ekonomi antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura.<sup>43</sup>

Pada periode 1980-an hingga 1990-an, pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan perdagangan lokal, seperti pasar, pertokoan, dan pusat perbelanjaan (mall/shopping center). Beberapa pasar yang telah dibangun antara lain Pasar Angso Duo dan Pasar Lopak di Kecamatan Jambi Pasar, Pasar Talang Banjar di Kecamatan Jambi Timur, Pasar Inpres TAC di Kecamatan Telanaipura, serta Pasar Inpres Kebon Handil di Kecamatan Kota Baru. Selain itu, penduduk mulai membangun bangunan yang menggabungkan tempat tinggal dan tempat berdagang, yang dikenal dengan istilah ruko (rumah toko), di sekitar kawasan pertokoan.<sup>44</sup>

Perekonomian masyarakat Kota Jambi mempunyai sektor tersier yang mendukungnya sektor yang mendukung ialah sektor industri baik industri skala besar dan menengah maupun industri skala kecil dan rumah tangga. Industri besar dan menengah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah barang/jasa yang diproduksi, sedangkan industri kecil dan rumah tangga dapat menciptakan kesempatan kerja, menyerap lebih banyak tenaga kerja, dan menghapus kemiskinan. Saat terjadinya krisis ekonomi tahun 1998, industri kecil di Kota Jambi semakin memiliki prospek cerah. Hal tersebut disebabkan karena jenis industri kecil dan rumah tangga mampu bertahan karena masih bersifat transisi, tidak membutuhkan modal besar dan dapat dilakukan dengan pemasaran terbatas. Berbeda dengan industri besar dan menengah yang apabila mengalami krisis tidak dapat lagi melanjutkan kegiatan produksinya karena kekurangan bahan baku yang seringkali di impor dari luar dan penurunan kualitas produk yang dihasilkan.<sup>45</sup>

#### **d. Sosial Budaya Jambi**

Jambi, sebagai salah satu provinsi di Sumatra, memiliki keberagaman sosial dan budaya yang kaya, yang mencerminkan perpaduan antara tradisi lokal, pengaruh budaya luar, dan perkembangan sosial yang terjadi sepanjang sejarah. Suku Melayu

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Dewi Fitriani, *Op.,cit.* hal. 28

<sup>45</sup> Siti Heidi Karmela, *Op.,cit.*

adalah kelompok etnis terbesar di Jambi. Bahasa Melayu Jambi merupakan bahasa ibu bagi sebagian besar penduduk dan juga digunakan dalam komunikasi sehari-hari serta dalam berbagai upacara adat. Dalam kehidupan sehari-hari, budaya Melayu sangat dominan, termasuk dalam seni, musik, tarian, dan sistem sosial.<sup>46</sup>

Bahasa Melayu Jambi merupakan bahasa sehari-hari bagi sebagian besar penduduk provinsi ini, dengan sejumlah dialek lokal. Bahasa ini memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat Jambi. Meskipun bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi digunakan dalam administrasi dan pendidikan, bahasa Melayu tetap menjadi simbol identitas budaya Jambi. Sastra Melayu Jambi, seperti puisi, syair, dan hikayat, telah berkembang sejak zaman kerajaan Melayu Jambi. Karya-karya sastra ini banyak mencerminkan nilai-nilai budaya, keagamaan, dan kehidupan sosial masyarakat Melayu. Seiring dengan perkembangan zaman, sastra modern Jambi juga mulai berkembang, dengan penulis lokal yang mengeksplorasi tema-tema kekinian.<sup>47</sup>

Mayoritas penduduk Jambi adalah Muslim, yang secara historis dipengaruhi oleh penyebaran Islam melalui jalur perdagangan yang berlangsung sejak abad ke-15. Islam mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai dari adat istiadat, perayaan, hingga sistem sosial dan hukum. Sebelum masuknya Islam, banyak kelompok etnis di Jambi yang menganut animisme atau kepercayaan lokal. Suku Anak Dalam, misalnya, hingga kini masih mempertahankan sebagian ritual tradisional yang berkaitan dengan penghormatan terhadap roh nenek moyang dan alam. Namun, seiring berjalannya waktu, pengaruh Islam telah membawa perubahan besar dalam praktik keagamaan di daerah ini.<sup>48</sup>

### 2.3 Gambaran Politik di Kota Jambi

---

<sup>46</sup> Anonim, BPS Kota Jambi Dalam Angka Tahun 1998, hlm. 34, <https://jambi.bps.go.id/id/publication/2011/02/21/352186e95addaec44d3de8df/jambi-dalam-angka-1998.html> diakses pada tanggal 03 Mei 2025.

<sup>47</sup> Anonim, BPS Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2001. <https://jambi.bps.go.id/id/publication/2011/02/21/9e929c543254ddd92c293b30/jambi-dalam-angka-2001.html> diakses pada tanggal 03 Mei 2025

<sup>48</sup> Anonim, BPS Kota Jambi Tahun 2000, <https://jambi.bps.go.id/id/publication/2011/02/21/72848e20bf94bb2973b5b0f8/jambi-dalam-angka-2000.html> diakses pada tanggal 03 Mei 2025

Pada masa reformasi, kondisi politik di Kota Jambi mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perubahan tersebut seiring dengan iklim demokrasi yang mulai terbuka setelah runtuhnya rezim Orde Baru. Kota Jambi sebagai ibu kota provinsi menjadi salah satu wilayah yang mencerminkan dinamika politik nasional, di mana munculnya berbagai partai politik baru turut meramaikan pesta demokrasi lokal.<sup>49</sup>

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan salah satu partai yang cukup aktif dalam pemilu di Kota Jambi. PDIP berjanji tidak akan melakukan praktik serangan fajar, yaitu tindakan yang berkaitan dengan pemberian uang kepada pemilih menjelang hari pencoblosan. Mereka menegaskan tidak akan terlibat dalam praktik yang dikenal sebagai ‘saweran subuh’, yaitu upaya membayar konstituen pada pagi hari sebelum pemilu berlangsung.<sup>50</sup>

Namun, PDIP bukan satu-satunya kekuatan politik di Kota Jambi. Partai Golkar yang sebelumnya dominan pada masa Orde Baru tetap menunjukkan kekuatannya dengan infrastruktur partai yang kuat hingga ke tingkat kelurahan. Golkar memanfaatkan jaringan birokrasi dan loyalis lama untuk mempertahankan eksistensinya, terutama pada Pemilu 1999 yang menjadi ujian pertama setelah tidak lagi mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat.<sup>51</sup>

Partai Amanat Nasional (PAN) juga memainkan peran penting, terutama karena banyak kadernya berasal dari kalangan Muhammadiyah dan reformasi lokal. PAN menjadi representasi aspirasi baru masyarakat Kota Jambi, terutama generasi muda dan kelompok masyarakat sipil yang menginginkan perubahan.<sup>52</sup> PAN dikenal aktif dalam menggalang massa melalui kegiatan sosial-keagamaan dan pendekatan berbasis komunitas.

Selain itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Bulan Bintang (PBB) turut meramaikan kompetisi politik lokal. Ketiga partai ini menyasar pemilih dari kalangan pesantren, masjid, dan ormas

---

<sup>49</sup> Jambi Ekspers, Juni 1999. Hal 6

<sup>50</sup> Op.cit

<sup>51</sup> Ibid

<sup>52</sup> Sejarah Partai Amanat Nasional di Jambi,” Repository Universitas Jambi, diakses dari <https://repository.unja.ac.id/34183/7/BAB%20II.pdf> pada tanggal 4 Mei 2024.

Islam.<sup>53</sup> Di Kota Jambi yang memiliki keberagaman etnis dan agama, partai-partai berbasis agama ini tetap memiliki ruang politik yang cukup kuat.

Gambaran politik di Kota Jambi juga tidak lepas dari peran media lokal seperti Jambi Ekspres, Jambi News, yang aktif memberitakan isu-isu politik.<sup>54</sup> Media sering menyoroti praktik-praktik kampanye yang tidak sehat, seperti penggunaan fasilitas negara atau politik uang, meskipun belum semua praktik tersebut dapat dibuktikan secara hukum.

Keterlibatan masyarakat dalam politik juga mulai tumbuh, terutama melalui diskusi publik, forum warga, dan pengawasan pelaksanaan pemilu. Organisasi masyarakat sipil dan kelompok pemantau pemilu seperti Panwaslu turut memberikan edukasi kepada pemilih untuk menggunakan hak suaranya secara bertanggung jawab.<sup>55</sup>

Dengan demikian, dinamika politik di Kota Jambi pada masa pemilu 1999 dan 2004 menunjukkan bahwa proses demokratisasi telah berjalan, meskipun belum sepenuhnya lepas dari praktik-praktik lama. Kehadiran banyak partai politik memberi pilihan kepada masyarakat, namun juga membuka peluang terjadinya fragmentasi suara dan kompetisi yang kadang tidak sehat.<sup>56</sup>

Jambi kaya akan sumber daya alam, termasuk minyak, gas, dan hasil perkebunan seperti kelapa sawit. Sumber daya alam ini memiliki pengaruh besar terhadap politik di provinsi tersebut. Banyak tokoh politik Jambi yang memiliki kaitan dengan sektor ekonomi ini, dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam menjadi isu politik yang krusial. Jambi, seperti banyak daerah lainnya, menghadapi tantangan dalam mengelola keragaman etnis dan agama. Meski secara umum situasi di Jambi relatif stabil, ada beberapa peristiwa ketegangan sosial yang terjadi, terutama dalam hubungan antar kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang.<sup>57</sup>

---

<sup>53</sup> Pemilu legislatif Indonesia 1999, [https://en.wikipedia.org/wiki/1999\\_Indonesian\\_legislative\\_election](https://en.wikipedia.org/wiki/1999_Indonesian_legislative_election) diakses pada tanggal 5 Mei 2024.

<sup>54</sup> Arsip Perpustakaan Daerah Jambi, dokumentasi Pemilu 1999 dan 2004.

<sup>55</sup> Op.cit. R. Siti Zuhro, dkk.

<sup>56</sup> Ibid, dokumentasi pemilu 1999 dan 2004

<sup>57</sup> Crouch, Harold. (2010). *Tentara dan Politik di Indonesia*. Cornell University Press. Amerika Serikat Hlm 65

Selain itu, pemilihan umum yang diadakan pada tahun 2004 menjadi momen penting bagi masyarakat Kota Jambi untuk menentukan arah politik mereka. Dengan adanya pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih wakil-wakil yang dianggap mampu mewakili aspirasi mereka. Hal ini menciptakan suasana kompetisi yang ketat di antara partai-partai politik yang berusaha meraih dukungan dari pemilih.<sup>58</sup>

### **BAB III** **PELAKSANAAN PEMILU DI KOTA JAMBI 1999 dan 2004**

#### **3.1 Persiapan Pemilihan Umum di Kota Jambi Masa Reformasi**

Pada masa Orde Baru, pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan dalam suasana yang sangat dikendalikan oleh pemerintah. Situasi ini menciptakan lingkungan politik yang terbatas dengan dominasi partai penguasa, yakni Partai Golkar, serta ruang yang sempit bagi partai oposisi untuk berpartisipasi dalam pemilu. Pemilihan yang dilakukan pada masa ini seringkali dianggap tidak mencerminkan semangat demokrasi, karena pemenuhan kepentingan pemerintah lebih diutamakan dibandingkan prinsip keterbukaan dan persaingan yang adil.<sup>59</sup>

Partai Golkar berkomitmen membangun masyarakat madani yang menjunjung kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul, dengan tetap menekankan tanggung jawab sosial. Ketua DPD TK I Jambi, H. Zainuddin ZA BBA, menekankan pentingnya suasana demokratis yang mendukung keterbukaan dan keadilan. Golkar menolak diskriminasi dan mendorong transparansi dalam sistem sosial-politik. Dalam

---

<sup>58</sup> Syamsiddin Haris, Partai, Pemilu, Dan Parlemen Era Reformasi, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia 2014 Hlm 16

<sup>59</sup> Liddle, William R., & Mujani, Saiful. (2005). *Transisi Demokrasi Indonesia: Studi Kasus Reformasi Politik dan Politik Pemilu*. *Journal of Asian Studies*, 64(4), 793-813.

menghadapi krisis nasional yang bersumber dari krisis moral dan kepercayaan, Golkar mendukung reformasi politik secara terencana dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi menciptakan kehidupan politik yang terbuka, adil, dan demokratis.<sup>60</sup>

Kampanye PDI Perjuangan di Lapangan Sengeti berlangsung meriah, dihadiri oleh Ketua DPD PDIP Jambi Umrin Eri, Ketua DPC Batanghari, dan mantan atlet nasional Elfira Rosa Nasution. Juru kampanye Nasrun Arbain menyerukan dukungan untuk Megawati Soekarnoputri dan mengajak masyarakat mencoblos nomor sebelas dalam Pemilu 7 Juni 1999. Calon legislatif Agnita Singedekane juga menyatakan kesiapannya maju ke DPR RI dengan restu tokoh adat dan Gubernur Jambi. Kampanye tersebut memperlihatkan PDIP sebagai simbol perlawanan terhadap Orde Baru, dengan semangat membangun demokrasi, kedaulatan rakyat, dan ekonomi yang berkeadilan. Ribuan simpatisan hadir memenuhi lapangan dengan atribut partai, menunjukkan antusiasme tinggi terhadap visi perubahan yang diusung PDIP.<sup>61</sup>

Penyelenggaraan Pemilu di Kota Jambi untuk pertama kalinya setelah reformasi dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dibentuk oleh Presiden pada Pemilu Tahun 1999. Struktur organisasi penyelenggaraannya mencakup tingkat pusat hingga daerah, mulai dari KPU, PPI, PPD I, PPD II, PPK, PPS, KPPS, PPLN, PPSLN, KPPSLN. Keanggotaan lembaga ini terdiri dari perwakilan partai politik peserta pemilu, ditambah tokoh masyarakat dan wakil pemerintah. Untuk mengawasi proses pemilu, dibentuk Panitia Pengawas Pelaksana Pemilu (Panwaslak Pemilu), yang bertugas memastikan pemilu berjalan sesuai aturan.<sup>62</sup>

Pemilu pertama yang dilaksanakan setelah reformasi adalah Pemilu 1999. Pemilu ini menjadi penting karena untuk pertama kalinya setelah lebih dari tiga dekade, Indonesia mengadakan pemilu yang bebas dan adil. Masyarakat Kota Jambi, sebagai bagian dari Indonesia, turut serta dalam Pemilu ini. Pemilu 1999 adalah pemilu pertama yang diadakan dengan sistem pemilu yang lebih terbuka dan bebas.

---

<sup>60</sup> Koran Independent. Juni 1999. Lampiran Hal 81

<sup>61</sup> Koran Independent, 3 Juni 1999, Lampiran Hal 82

<sup>62</sup> Komisi Pemilihan Umum (KPU), Laporan Hasil Pemilu 1999 di Kota Jambi (Jambi: KPU Kota Jambi, 1999)

Sebelumnya, pemilu hanya melibatkan beberapa partai yang diizinkan oleh pemerintah. Pada Pemilu 1999, berbagai partai baru bermunculan dan berkompetisi, termasuk partai-partai yang sebelumnya dilarang. Di Kota Jambi, pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kota.<sup>63</sup>

Meskipun masa persiapannya tergolong singkat, pelaksanaan pemungutan suara pada pemilu 1999 ini bisa dilakukan sesuai jadwal, yaitu tanggal 7 Juni 1999. Tidak seperti yang diprediksikan dan dikhawatirkan banyak pihak sebelumnya, ternyata pemilu 1999 bisa terlaksana dengan damai, tanpa ada kekacauan yang berarti. Hanya di beberapa Daerah Tingkat II di Sumatra Utara yang pelaksanaan pemungutan suaranya terpaksa diundur selama satu pekan. Itu pun karena adanya keterlambatan atas datangnya perlengkapan pemungutan suara.<sup>64</sup>

Untuk memastikan bahwa pemilih di Kota Jambi memahami proses pemilu yang baru, berbagai lembaga, baik pemerintah maupun organisasi masyarakat, melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada warga. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat, mengedukasi mereka mengenai pentingnya pemilu, serta bagaimana cara menggunakan hak suara dengan benar. Salah satu perubahan terbesar pasca-reformasi adalah sistem multipartai. Pada Pemilu 1999, partai-partai politik yang sebelumnya dilarang kembali muncul dan berkompetisi secara terbuka. Di Kota Jambi, banyak partai politik baru yang mendaftar untuk ikut serta dalam pemilu, dan beberapa partai besar, seperti Partai Golkar, PDI Perjuangan, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), memiliki pengaruh besar. Partai-partai baru ini menghadirkan dinamika politik yang lebih beragam.<sup>65</sup>

### **Gambar 3. 1 Pemberian hak suara secara langsung pada pemilu tahun 1999**

---

<sup>63</sup> Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jambi. (1999). Laporan Hasil Pemilu 1999 di Kota Jambi. Jambi: KPU Kota Jambi.

<sup>64</sup> Pemilu 1999, Pemilu Pertama Pasca-Orde Baru, Diakses pada 24 Januari 2025. <https://www.kompas.id/baca/foto/2023/06/07/arsip-foto-kompas-pemilu-1999-pemilu-pertama-paska-orde-baru?>

<sup>65</sup>Jambi Ekspres. Kancan Demokrasi, 1999, hlm 5



Sumber: Jambi Ekpres Kancan Demokrasi 1999

Persiapan untuk Pemilu 2004 termasuk di Kota Jambi, peningkatan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi yang lebih luas, penggunaan media massa, serta melibatkan masyarakat dalam berbagai forum diskusi politik. Keterlibatan masyarakat dalam pemilu meningkat seiring dengan meningkatnya pemahaman mereka tentang demokrasi dan hak politik mereka. Salah satu langkah penting dalam persiapan Pemilu termasuk di Kota Jambi adalah penguatan lembaga-lembaga pengawas pemilu, baik dari pemerintah, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), maupun dari organisasi masyarakat sipil. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu semakin ketat untuk memastikan pemilu yang lebih transparan dan bebas dari kecurangan, seperti politik uang dan intimidasi.<sup>66</sup>

Masyarakat Kota Jambi pada Pemilu 2004 menunjukkan semangat demokrasi yang tinggi, dan salah satu wujud antusiasme itu tampak dari beberapa suasana Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang didekorasi secara meriah sehingga menarik perhatian. Warga masyarakat kota Jambi dan panitia TPS menghias lokasi dengan berbagai atribut seperti bendera merah putih, spanduk partai, umbul-umbul, dan

---

<sup>66</sup> Veri Junaidi. 2013. "Pelibatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu," diakses pada tanggal 04 mei 2025, [Pelibatan dan partisipasi masyarakat PDF copied from the Internet by Library of Congress Jakarta Office on 3/5/2018.](#)

hiasan lainnya untuk menciptakan suasana pesta demokrasi yang benar-benar terasa seperti "pesta rakyat". Beberapa TPS bahkan dibuat dengan menyediakan tenda yang terlihat seperti pesta pernikahan, sebagai bentuk semangat demokrasi, kebersamaan dan gotong royong. Dekorasi meriah ini bukan hanya mencerminkan antusiasme, tapi juga rasa tanggung jawab warga Kota Jambi dalam menjalankan hak pilih mereka, sekaligus menunjukkan bahwa demokrasi bisa dirayakan dengan semangat positif.<sup>67</sup>

### **3.2 Pelaksanaan Pemilihan Umum di Kota Jambi Masa Reformasi**

Pemilu 1999 menjadi tonggak penting dalam sejarah politik Indonesia, termasuk di Kota Jambi, karena untuk pertama kalinya setelah runtuhnya Orde Baru, masyarakat diberikan kesempatan untuk memilih langsung wakil-wakil mereka dalam suasana yang lebih demokratis. Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota legislatif tingkat pusat hingga daerah, termasuk DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota, serta menjadi awal dari pembaruan sistem politik secara nasional.<sup>68</sup>

Proses pemilu 1999 termasuk di Kota Jambi berlangsung dalam suasana penuh antusiasme. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama berbagai lembaga masyarakat aktif melakukan sosialisasi kepada pemilih. Hal ini diperlukan karena pemilu 1999 menggunakan sistem yang berbeda dari sebelumnya, seperti penggunaan banyak surat suara dan proses pemungutan yang lebih kompleks.<sup>69</sup> Tingkat partisipasi masyarakat meningkat secara signifikan, mencerminkan semangat baru dalam berdemokrasi.

Pada hari pemungutan suara, suasana Kota Jambi berubah drastis. Pusat-pusat kegiatan ekonomi seperti pasar dan swalayan tutup, aktivitas perkantoran menurun, dan masyarakat berbondong-bondong ke TPS. Tingkat partisipasi pemilih sangat tinggi, mencerminkan antusiasme terhadap perubahan politik.<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup> Koran Jambi Ekspers. Radar Kota. April 2004

<sup>68</sup> Sigit Pamungkas. (2005). "Dinamika Pemilu 1999 di Indonesia: Studi Kasus di Kota Jambi." *Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 45-60.

<sup>69</sup> Arif Sugitanata, "Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi," *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2021.

<sup>70</sup> Koran Independent, edisi Selasa, 8 Juni 1999.

Salah satu dinamika penting dalam pelaksanaan pemilu adalah peran lembaga pemantau. Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Tanjab menjadi sorotan setelah mengeluarkan laporan yang kemudian diklarifikasi oleh Panwaslu Tanjab. Klarifikasi ini diperlukan untuk menjaga transparansi dan objektivitas informasi. KIPP berharap Panwaslu bersikap proaktif dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran.<sup>71</sup>

Di sisi lain, kasus di wilayah Sarko menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga kredibilitas lembaga pemantau. Dua individu yang mengaku sebagai anggota KIPP namun tidak terdaftar secara resmi mengganggu kegiatan pemantauan yang sah. KIPP Sarko dengan tegas membantah keterlibatan mereka, menandakan pentingnya koordinasi internal dan validasi struktur organisasi pemantau pemilu.<sup>72</sup>

**Gambar 3. 2 Kondisi masyarakat Kota Jambi saat pemilihan umum berlangsung 1999**



**Sumber: Independent, Angso duo Pos 1999**

Berdasarkan laporan Koran Independent, 8 Juni 1999, Pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu 1999 di Kota Jambi berlangsung tertib dan aman, dengan partisipasi masyarakat yang sangat tinggi. Hampir seluruh warga datang ke TPS,

<sup>71</sup> Koran Independent, 3 Juni 1999.

<sup>72</sup> Ibid

menjadikan suasana kota lengang karena pusat perbelanjaan, pasar tradisional, dan kantor-kantor memilih tidak beroperasi. Aktivitas di jalan protokol dan bandara juga menurun drastis. Kondisi ini mencerminkan kesadaran politik masyarakat yang meningkat, terbukti dari keterlibatan mereka tidak hanya saat pencoblosan, tetapi juga dalam proses penghitungan suara. Secara keseluruhan, Pemilu 1999 menandai semangat baru masyarakat Kota Jambi dalam mewujudkan demokrasi yang jujur dan transparan.<sup>73</sup>

Peran partai politik dalam pemilu 1999 juga sangat menonjol. PDI Perjuangan, misalnya, menyelenggarakan kampanye besar-besaran yang dipenuhi oleh simpatisan. Dalam orasinya, tokoh-tokoh partai mengajak masyarakat untuk mengakhiri dominasi Orde Baru. Dukungan terhadap Megawati Soekarnoputri menjadi simbol perlawanan terhadap rezim sebelumnya, serta upaya mengembalikan kedaulatan rakyat melalui pemilu yang jujur dan adil.<sup>74</sup>

Sementara itu, Partai Golkar menyampaikan visi membangun masyarakat madani yang demokratis dan terbuka. Komitmen terhadap keadilan sosial, kebebasan berserikat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi bagian dari agenda reformasi yang diusung oleh partai ini. Golkar menyoroti pentingnya mengatasi krisis kepercayaan dan moral pasca runtuhnya Orde Baru.<sup>75</sup>

Pemilu 2004 di Kota Jambi menandai tonggak sejarah penting dalam praktik pemilihan umum di Indonesia, dengan melibatkan pemilihan anggota DPRD Kota serta pemilihan kepala daerah atau Pilkada secara langsung. Pemilu ini menjadi titik balik karena untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, pemilihan kepala daerah dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat, bukan melalui pemilihan oleh DPRD seperti pada masa sebelumnya. Perubahan ini menunjukkan komitmen untuk

---

<sup>73</sup> Koran Jambi Ekspres. 8 Juni 1999. Lampiran Hal 83

<sup>74</sup> Jambi Ekspers, 5 Juni 1999

<sup>75</sup> Ibid, Independent. 3 Juni 1999

mendemokratisasikan proses pemilihan dan memberikan kekuasaan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin mereka secara langsung.<sup>76</sup>

Untuk persiapan pemilu tahun 2004 menjadi lebih baik dari pemilu tahun 1999. Dapat dilihat dari berbagai perkembangan dan kemajuan dari adanya pembaruan sejak pemilu tahun 1999. Semakin ramai dari sebelumnya mulai dari kampanye yang lebih bervariasi, semangat bersaing yang terasa karena menjadi kampanye terbuka dan Masyarakat langsung memilih sesuai keinginan dan kepercayaan, juga semakin banyak kandidat yang dapat berpartisipasi menjadikan pemilu tahun 2004 ramai dan terasa kompetitif sekali.<sup>77</sup>

Isu utama yang diangkat dalam kampanye Pilkada di Kota Jambi berkisar pada pembangunan kota, peningkatan infrastruktur, dan kesejahteraan rakyat. Banyak kandidat menyoroti pentingnya penyelesaian masalah seperti akses jalan, pembangunan fasilitas publik, dan peningkatan layanan dasar untuk masyarakat. Selain itu, isu kesejahteraan seperti pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja juga menjadi perhatian utama dalam janji kampanye para calon. Isu-isu ini mencerminkan kebutuhan dasar masyarakat Kota Jambi yang ingin melihat kemajuan dan perbaikan kualitas hidup mereka melalui kebijakan dari pemimpin yang terpilih.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Muhammad Bahrul Ulum. 2021. Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Setelah Reformasi: Kesenambungan dan Perubahan. *Jurnal Hukum*. Vol. 4 No. 2 (2021): 309-343, DOI: 10.22437/ujh.4.2.309-343

<sup>77</sup> Wawancara. Wein Arifin (45 Tahun) Ketua Bawaslu Kota Jambi pada tanggal 18 Desember 2024

<sup>78</sup> Op.cit BPS Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2004.

**Gambar 3. 3 Pemberian hak suara secara langsung pada pemilu tahun 2004**



Sumber: Jambi Ekpres Kancan Demokrasi 2004

Dengan dinamika yang cukup kompetitif, Pemilu 2004 di Kota Jambi berhasil menciptakan suasana politik yang partisipatif dan inklusif. Melalui pemilihan langsung ini, masyarakat memiliki peran yang lebih signifikan dalam menentukan pemimpin mereka. Pemilihan kepala daerah langsung bukan hanya simbol perubahan demokrasi tetapi juga memperkuat aspirasi masyarakat untuk memiliki pemimpin yang lebih dekat dan memahami kebutuhan mereka. Pemilu 2004 mencerminkan semangat baru dalam praktik demokrasi di Indonesia dan memberikan pengalaman baru bagi Kota Jambi dalam membangun pemerintahan yang demokratis dan berpihak kepada rakyat.<sup>79</sup>

Masyarakat Kota Jambi pada Pemilu 2004 menunjukkan semangat demokrasi yang tinggi, dan salah satu wujud antusiasme itu tampak dari beberapa suasana Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang didekorasi secara meriah sehingga menarik

---

<sup>79</sup> Jambi Ekpres, Radar Kota, September 2004. Hlm 3

perhatian. Warga masyarakat kota Jambi dan panitia TPS menghias lokasi dengan berbagai atribut seperti bendera merah putih, spanduk partai, umbul-umbul, dan hiasan lainnya untuk menciptakan suasana pesta demokrasi yang benar-benar terasa seperti "pesta rakyat". Beberapa TPS bahkan dibuat dengan menyediakan tenda yang terlihat seperti pesta pernikahan, sebagai bentuk semangat demokrasi, kebersamaan dan gotong royong. Dekorasi meriah ini bukan hanya mencerminkan antusiasme, tapi juga rasa tanggung jawab warga kota Jambi dalam menjalankan hak pilih mereka, sekaligus menunjukkan bahwa demokrasi bisa dirayakan dengan semangat positif.<sup>80</sup>

Partisipasi pemilih di Kota Jambi cukup tinggi, mencerminkan antusiasme masyarakat untuk terlibat dalam proses politik pasca-reformasi. KPU mencatat bahwa banyak warga yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk memberikan suara mereka, meskipun ada tantangan terkait keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan.<sup>81</sup>

Dalam Pelaksanaan pemilu 2004 di Kota Jambi kemungkinan adanya kecurangan masih menjadi permasalahan. Pawaslu melakukan beberapa strategi yang mana dilakukan agar menghindari adanya kecurangan dan mengawasi jalannya pilpers pada saat itu. Salah satu strategi yang dilakukan pamwaslu yaitu adanya Gerakan pengawas keliling. Gerakan ini dimaksudkan menjaga keamanan PILPERS (pemilihan presiden) berjalan seksama dan mengurangi jika adanya kendala pada saat pemilihan.<sup>82</sup>

### **3.3 Pemenang Pemilihan Umum di Kota Jambi Masa Reformasi**

Sejak masa reformasi yang dimulai pada tahun 1998 hingga saat ini, Pemilihan Umum (Pemilu) di Kota Jambi mengalami banyak perubahan dalam hal politik, dinamika partai, serta pemilihannya. Setiap pemilu atau Pilkada di Kota Jambi tidak

---

<sup>80</sup> *Op. Cit*

<sup>81</sup> Jambi Independent, 1999 lihat Lampiran Hlm 75

<sup>82</sup> Wawancara. Ansorullah (64 Tahun) Ketua Panwaslu Provinsi Jambi pada tanggal 09 Januari 2025

hanya menggambarkan hasil dari kompetisi politik antarpolisi atau kandidat, tetapi juga refleksi dari perubahan besar dalam struktur politik Indonesia pasca-Orde Baru.<sup>83</sup>

Pemilu 1999 adalah pemilu pertama pasca-Orde Baru yang membuka sistem multipartai. Ini adalah pemilu yang sangat penting bagi Kota Jambi, karena untuk pertama kalinya, masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih wakil rakyat mereka tanpa adanya pembatasan seperti pada masa Orde Baru. Partai Golkar menjadi pemenang Pemilu 1999 di Kota Jambi, meskipun kekuasaannya tidak sebesar di masa Orde Baru. Namun, Golkar masih mendominasi di tingkat legislatif baik di tingkat provinsi maupun kota. Golkar berhasil mengirimkan banyak wakilnya ke DPRD Kota Jambi.<sup>84</sup>

Dalam Pemilu tahun 1999 Partai yang memperoleh suara terbanyak adalah PDI-P yaitu 35.689.073 suara atau 33,74 persen dengan perolehan 153 kursi. Golkar memperoleh 23.741.758 suara atau 22,44 persen sehingga mendapatkan 120 kursi atau kehilangan 205 kursi dibanding pemilu 1997. PKB dengan 13.336.982 suara atau 12,61 persen mendapatkan 51 kursi. PPP dengan 11.329.905 suara atau 10,71 persen mendapatkan 58 kursi atau kehilangan 31 kursi dibanding pemilu 1997. PAN meraih 7.528.956 suara atau 7,12 persen mendapatkan 34 kursi.<sup>85</sup>

Pemilu 2004 adalah pemilu yang sangat penting karena untuk pertama kalinya Indonesia mengadakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Pemilu ini juga mencatatkan perubahan besar dalam politik lokal Kota Jambi, di mana masyarakat Kota Jambi memilih wali kota dan wakil wali kota mereka secara langsung. Partai Golkar masih menjadi salah satu partai terbesar di Kota Jambi, meskipun beberapa partai baru seperti Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera

---

<sup>83</sup> Kompas, Lika-liku Pemilu Indonesia dari Masa ke Masa, diakses pada tanggal 4 mei 2025, [https://www.kompas.id/baca/riset/2024/02/13/lika-liku-pemilu-indonesia-dari-masa-ke-masa?status=sukses\\_login&status\\_login=login&loc=hard\\_paywall](https://www.kompas.id/baca/riset/2024/02/13/lika-liku-pemilu-indonesia-dari-masa-ke-masa?status=sukses_login&status_login=login&loc=hard_paywall)

<sup>84</sup> Amin Suprihatini, 2008. Pemilu dari Masa ke Masa, Jakarta. Penerbit: Cempaka Putih. Hlm 45

<sup>85</sup> Amin Suprihatini. Ibid hlm 51

(PKS), dan PAN juga mulai memperoleh kursi yang signifikan di DPRD Kota dan Provinsi.<sup>86</sup>

Partai Golkar berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu partai terbesar di Kota Jambi, memenangkan 12 kursi dari total 30 kursi di DPRD Kota Jambi pada Pemilu 2004. Namun, persaingan dengan PDI Perjuangan semakin ketat. Dalam Pemilu 2004, PDI Perjuangan mencatatkan peningkatan signifikan, meraih 10 kursi, meningkat dari 5 kursi pada pemilu sebelumnya, yang mencerminkan besarnya dukungan masyarakat terhadap partai ini di tingkat lokal. Sementara itu, Partai Demokrat, yang baru pertama kali berpartisipasi dalam Pemilu, berhasil menarik perhatian pemilih muda dan kalangan profesional dengan mengusung isu-isu perubahan dan pemberdayaan ekonomi lokal, meraih 6 kursi di DPRD Kota Jambi.<sup>87</sup>

Partai Amanat Nasional (PAN) sering kali dikaitkan dengan sosok Amien Rais, seorang tokoh reformasi yang dikenal luas baik di tingkat nasional maupun internasional. Kepemimpinan dan reputasi intelektual Amien Rais memberikan pengaruh signifikan terhadap citra PAN sebagai partai politik yang reformis dan memiliki nilai-nilai perubahan. Sejak didirikan pada 23 Agustus 1998 dengan asas Pancasila, PAN telah membangun struktur organisasi yang solid, mencakup 30 provinsi, lebih dari 300 kabupaten, dan 1.512 kecamatan di seluruh Indonesia. Sebagai partai yang lolos ambang batas electoral threshold, PAN tidak diwajibkan mengikuti verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk dapat berpartisipasi dalam Pemilu 2004. Dengan posisi tersebut, PAN terus melakukan berbagai persiapan dan strategi politik, baik di tingkat pusat maupun di daerah, guna memenangkan pemilu dan mendorong ketua umumnya sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Di Provinsi Jambi, popularitas PAN cukup tinggi, yang sebagian besar dipengaruhi oleh kepemimpinan Zulkifli Nurdin sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN sekaligus Gubernur Jambi saat itu. Kedekatannya dengan masyarakat, terutama dari kalangan akar rumput, berperan besar dalam

---

<sup>86</sup> Komisi Pemilihan Umum, diakses pada tanggal 4 Mei 2025, <https://www.kpu.go.id/page/read/1114/pemilu-2004>

<sup>87</sup> Jambi Ekspers.(2004). Independent. Hlm 15

memperkuat posisi PAN di daerah. Keberadaan struktur PAN yang lengkap hingga ke tingkat DPD dan DPC di hampir seluruh wilayah Jambi memperkuat keyakinan partai untuk meraih kemenangan dalam Pemilu 2004. Dengan basis yang telah dibangun sejak enam tahun sebelumnya dan jaringan politik yang luas, PAN menargetkan untuk menjadi pemenang pemilu di Provinsi Jambi. Tujuannya adalah untuk mempertahankan pengaruh politik partai, termasuk mempertahankan posisi ketua umumnya sebagai Gubernur Jambi.<sup>88</sup>

Partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2004 di Kota Jambi mencapai angka yang cukup tinggi, dengan lebih dari 70% pemilih terdaftar menggunakan hak pilihnya. Sosialisasi yang masif dari KPU dan peningkatan kesadaran politik masyarakat menjadi faktor utama di balik antusiasme ini. Pemilu 2004 di Kota Jambi tidak hanya mengubah lanskap politik lokal tetapi juga menunjukkan komitmen masyarakat terhadap proses demokrasi yang lebih inklusif.<sup>89</sup>

Pemilu tahun 2004 dilaksanakan dengan menerapkan sistem pemilihan secara langsung. Hal ini sebenarnya bukan merupakan hal yang baru dalam sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia, kecuali untuk pemilihan presiden/wapres dan pilkada. Sistem pemilu langsung sebelumnya pernah diterapkan dalam pemilu legislatif (Konstituante dan DPR) pada tahun 1955. Pemilu secara langsung ini dilaksanakan untuk memilih anggota Konstituante dan DPR sebagaimana disebutkan dalam UU No. 29 Tahun 1953. Saat itu yang berlaku adalah pemilih memberikan suara dengan menusuk tanda gambar partai pilihannya, sekaligus pemilih menulis nomor dan nama calon yang menjadi pilihannya dalam daftar pada<sup>90</sup>

Di luar lima Partai besar, Partai lama yang masih ikut, yaitu PDI merosot tajam dan hanya meraih dua kursi dari pembagian kursi sisa atau kehilangan Sembilan kursi disbanding pemilu 1997. Berikut tabel hasil peroleh suara pemilu tahun 1999.

---

<sup>88</sup> Koran Independent, 2004. Hal 4

<sup>89</sup> Harian Jambi, "Persaingan Ketat Golkar dan PDI-P di Pemilu Kota Jambi," 12 Mei 2004.

<sup>90</sup> Komisi Pemilihan Umum (KPU), Laporan Hasil Pemilu 2004 di Kota Jambi (Jambi: KPU Kota Jambi, 2004)

**Tabel 3. 1 Hasil Suara Pemilu Legislatif 1999**

No	Nama Partai	DPRD I	DPRD II
1.	PIB	413	560
2.	Krisna	550	879
3.	PNI-S	433	444
4.	PADI	302	277
5.	KAMI	376	396
6.	PUI	710	284
7.	PKU	276	297
8.	PMB	543	630
9.	PPP	15.413	16.060
10.	PSII	735	808
11.	PDI-P	69.717	71.501
12.	PAY	269	315
13.	PKM	128	141
14.	PDKB	292	278

15.	PAN	15.518	16.973
16.	PRD	90	96
17.	PSII 1905	139	141
18.	PKD	131	123
19.	PILAR	188	169
20.	PARI	300	1.887
21.	MASYUMI	1.886	2.164
22.	PBB	5.663	4.634
23.	PSP	187	203
24.	PK	1.866	1.893
25.	PNU	1.315	1.226
26.	PNI-FM	561	571
27.	IPKI	369	303
28.	PR	388	393
29.	PID	129	95
30.	PNI-MM	246	256

31.	MURBA	199	155
32.	PDI	655	638
33.	GOLKAR	55.674	56.778
34.	PP	2.591	2.464
35.	PKB	4.513	3.369
36.	PUDI	343	355
37.	PBN	564	568
38.	MKGR	266	270
39.	PDR	505	380
40.	PCD	309	327
41.	PKP	5.271	5.301
42.	P-SPSI	178	123
43.	PNBI	124	138
44.	PBI	770	783
45.	SUNI	203	210
46.	PND	483	229

47.	PUMI	97	123
48	PPI	430	579

Sumber: Koran Independen 13 Juni 1999

Pada Tabel di atas menyajikan data perolehan suara masing-masing partai politik dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat I dan Tingkat II. Data mencakup 48 partai peserta pemilu yang memperoleh suara di dua tingkatan tersebut. Beberapa partai besar seperti PDI-P, Golkar, dan PAN mencatatkan perolehan suara yang sangat signifikan, baik di tingkat provinsi (DPRD I) maupun di tingkat kabupaten/kota (DPRD II). Misalnya, PDI-P memperoleh 69.717 suara di DPRD I dan 71.501 suara di DPRD II, sementara Golkar meraih 55.674 suara dan 56.778 suara pada masing-masing tingkatan. Partai-partai seperti PPP, PBB, dan PKP juga menunjukkan performa yang cukup kuat, dengan total suara ribuan di kedua tingkatan. Di sisi lain, terdapat pula partai-partai kecil seperti PRD, PNBI, dan PUMI yang memperoleh suara di bawah 500, namun tetap menunjukkan partisipasi aktif dalam kontestasi demokrasi.

Pemilu tahun 2004 diikuti oleh 24 partai politik, Partai-partai politik tersebut telah lulus dalam verifikasi, baik di Departemen Kehakiman dan HAM maupun di KPU. Bagaimana suara yang diperoleh oleh tiap-tiap partai politik tersebut dalam pemilu tahun 2004. Berikut tabel hasil perolehan suara pada tiap-tiap partai politik peserta pemilu 2004.

**Tabel 3. 2 Hasil suara pemilu 2004**

NO	Nama Partai	Suara DPR	Kursi
1.	Partai Nasional Indonesia	17.152	-

	Marhaenisme		
2.	Partai Buruh Sosial Demokrat	11.623	-
3.	Partai Bulaan Bintang	42.632	-
4.	Partai Merdeka	14.544	-
5.	Partai Persatuan Pembangunan	74.388	1
6.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	16.532	-
7.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	9.745	-
8.	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	11.927	-
9.	Partai Demokrat	73.824	1
10.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	15.580	-
11.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	5.518	-
12.	Partai Persatuan Nahdatul	8.210	-

	Ummah		
13.	Partai Amanat Nasional	224.825	1
14.	Partai Karya Peduli Bangsa	57.573	-
15.	Partai Kebangkitan Bangsa	64.503	-
16.	Partai Keadilan Sejahtera	68.846	1
17.	Partai Bintang Reformasi	45.219	-
18.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	142.588	1
19.	Partai Damal Sejahtera	16.292	-
20.	Partai Golongan Karya	316.039	2
21.	Partai Patriot Pancasila	11.000	-
22.	Partai Sarikat Indonesia	9.025	-
23.	Partai Persatuan Daerah	12.993	-
24.	Partai Pelapor	7.502	2
Total		<b>1.278.080</b>	7

Sumber: Hasil Laporan Suara KPU 2004

Pada Tabel di atas, Hasil pemilihan umum legislatif di Jambi menunjukkan total suara mencapai 1.278.080 dengan 7 kursi yang diperebutkan. Partai Golongan karya (Golkar) mendominasi hasil dengan meraih 316.039 suara dan 2 kursi, diikuti oleh Partai Amanat Nasional (PAN) yang memperoleh 224.825 suara dan 1 kursi. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga menunjukkan performa baik dengan 142.588 suara dan 1 kursi, sementara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendapatkan 74.388 suara dan 1 kursi. Beberapa partai kecil seperti Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan Sejahtera juga berhasil mendapatkan kursi, meskipun dengan jumlah suara yang lebih rendah, mencerminkan keberagaman politik di parlemen Indonesia pasca-reformasi.

## **BAB IV DINAMIKA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 1999 DAN 2004 DI KOTA JAMBI**

### **4.1 Dinamika Pemilu Legislatif 1999 di Kota Jambi**

Dinamika secara harfiah merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari gerak benda serta gaya atau energi yang menyebabkan gerakan tersebut. Istilah "dinamika" berasal dari kata "dinamis" yang menggambarkan suatu sifat yang memiliki tenaga, kemampuan, serta kecenderungan untuk terus bergerak dan

mengalami perubahan.<sup>91</sup> Menurut Leo Agustino, dinamika politik memiliki keterkaitan yang erat dengan isu partisipasi dan demokrasi. Meskipun isu partisipasi telah lama menjadi pembahasan, permasalahan tetap muncul karena adanya kecenderungan penafsiran yang menyimpang dari pihak penguasa. Partisipasi sering kali diartikan semata-mata sebagai keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan agenda pemerintah, sehingga bentuk partisipasi yang muncul cenderung bersifat birokratis dan teknokratis, seperti melalui mekanisme perencanaan dari bawah dan penjaringan aspirasi.<sup>92</sup>

Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1999 dan 2004 merupakan tonggak penting dalam sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia. Keduanya memiliki perbedaan yang signifikan, baik dari segi sistem maupun mekanisme pelaksanaannya. Pemilu tahun 1999 menjadi pemilu pertama yang diselenggarakan pasca runtuhnya rezim Orde Baru, sehingga nuansa reformasi sangat kental mewarnai proses politik pada masa itu. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, masyarakat Indonesia memperoleh ruang kebebasan yang lebih luas dalam menyalurkan hak politiknya secara demokratis. Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota legislatif dan diikuti oleh 48 partai politik, yang mencerminkan tingginya antusiasme publik terhadap era demokratis yang baru tumbuh. Kendati demikian, dalam Pemilu 1999, mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden masih dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sehingga partisipasi rakyat belum sepenuhnya menyentuh ranah eksekutif secara langsung.<sup>93</sup>

Tahun 1999 merupakan momentum bersejarah bagi masyarakat Indonesia, termasuk bagi warga Kota Jambi. Setelah mengalami masa panjang di bawah pemerintahan Orde Baru yang sentralistik dan cenderung represif, masyarakat Jambi menyambut pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) pertama di era reformasi dengan antusiasme yang tinggi serta harapan akan perubahan. Sejak pagi hari pada saat

---

<sup>91</sup> Idrus, H. A. (1996). Kamus Umum Baku Bahasa Indonesia. Surabaya: Bintang Usaha.

<sup>92</sup> Agustino, L. (2009). *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

<sup>93</sup> Pahrudin, Potret Jambi: Bunga Rampai Kajian Sosial, Politik, dan Kebijakan di Negeri Sepucuk Jambi Sembilan Lurah, Yogyakarta: Jivaloka, 2022, Hlm 127

pemungutan suara, tempat-tempat pemungutan suara (TPS) di berbagai wilayah Kota Jambi mulai dipadati oleh warga yang ingin menyalurkan hak politiknya. Suasana pada pemilu kali ini terasa berbeda dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, karena masyarakat mulai merasakan bahwa suara mereka memiliki arti penting dalam menentukan arah masa depan bangsa. Tingginya angka partisipasi pemilih, termasuk dari kelompok pemilih muda dan perempuan, menunjukkan meningkatnya kesadaran politik masyarakat serta semangat baru dalam berdemokrasi pasca runtuhnya rezim Orde Baru.<sup>94</sup>

Lahirnya undang-undang di bidang politik pada masa reformasi membawa dampak signifikan terhadap dinamika kehidupan politik di Indonesia. Salah satu implikasi utama dari regulasi baru ini adalah terbukanya ruang bagi pembentukan partai politik secara lebih bebas, yang ditandai dengan kemunculan lebih dari 112 partai politik. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 48 partai yang dinyatakan memenuhi persyaratan administratif dan legal untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum. Selain itu, perubahan penting lainnya adalah peralihan wewenang penyelenggaraan pemilu dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang menjadi lembaga independen. Keanggotaan KPU pada masa itu terdiri atas perwakilan dari pemerintah dan partai politik peserta pemilu, mencerminkan transisi menuju penyelenggaraan pemilu yang lebih terbuka, inklusif, dan demokratis.<sup>95</sup>

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1999 di Kota Jambi menandai momen penting dalam transisi demokrasi pascareformasi. Antusiasme masyarakat Kota Jambi dalam menyambut pemilu pertama di era reformasi tercermin dari tingginya partisipasi warga dalam menggunakan hak pilihnya. Pada hari pelaksanaan pemilu, suasana Kota Jambi mengalami perubahan yang signifikan. Hampir seluruh warga kota mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) sejak pagi hari, mengakibatkan berbagai pusat aktivitas ekonomi dan sosial, seperti pasar, swalayan,

---

<sup>94</sup> Ibid

<sup>95</sup> Ibid

serta toko-toko besar, memilih untuk tidak beroperasi. Menurut laporan Harian Independent edisi Selasa, 8 Juni 1999, hampir seluruh TPS dipenuhi warga, sementara jalan-jalan protokol dan fasilitas umum tampak lengang. Pusat-pusat perbelanjaan seperti Mandala Swalayan, Abadi Swalayan, Tropi, dan Matahari Angsoduo tidak beraktivitas. Bahkan, pasar tradisional seperti Pasar Talang Banjar dan Angsoduo mengalami penurunan aktivitas karena para pedagang memilih untuk tidak berjualan, baik karena pertimbangan ekonomi maupun kesadaran akan pentingnya pemilu. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran politik yang tinggi di kalangan masyarakat, di mana partisipasi tidak hanya dilakukan melalui pencoblosan, tetapi juga melalui keikutsertaan dalam memantau jalannya penghitungan suara di TPS. Keamanan kota pun tetap terjaga dengan baik. Kantor-kantor pemerintah, fasilitas vital seperti Kantor Gubernur, Bank Indonesia, dan RRI Jambi dijaga ketat oleh aparat keamanan. Bahkan Bandara Sultan Thaha pun terlihat sepi, hanya dijaga oleh beberapa petugas. Kondisi ini mencerminkan bahwa pelaksanaan Pemilu 1999 tidak hanya menjadi pesta demokrasi secara formal, tetapi juga momentum perubahan sosial-politik yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Tingginya antusiasme warga dalam menggunakan hak pilih sekaligus menjadi bentuk nyata perwujudan semangat reformasi di tingkat lokal, khususnya di Kota Jambi.<sup>96</sup>

Pada Pemilihan Umum tahun 1999, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) memperoleh suara tertinggi di Kota Jambi. PDI Perjuangan berhasil meraih 69.717 suara untuk tingkat DPRD Provinsi (DPRD I) dan 71.501 suara untuk tingkat DPRD Kabupaten/Kota (DPRD II). Kemenangan ini tidak terlepas dari kuatnya dukungan masyarakat terhadap partai tersebut, yang sebelumnya telah tercermin melalui mobilisasi massa dalam kampanye akbar yang dikenal dengan istilah “Mega Merahkan Jambi.” Peristiwa ini menjadi momen politik yang signifikan, di mana tidak kurang dari 20.000 massa pendukung PDI Perjuangan dari berbagai wilayah, khususnya Kabupaten Batanghari, menghadiri acara kampanye tersebut. Kampanye ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting partai, antara lain calon

---

<sup>96</sup> Koran Jambi Ekspres. Juni 1999. Liat di lampiran Hal 83

anggota DPR RI Ir. Agnita Singedekane, Irsal, Ir. Nasrun HR Arbain, M.Si (Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi), dan Umrin Eri (Ketua DPC PDI Perjuangan Batanghari). Kehadiran massa dalam jumlah besar serta semangat yang ditunjukkan selama kampanye memperlihatkan bahwa PDI Perjuangan berhasil membangun kedekatan emosional dan ideologis dengan masyarakat. PDI Perjuangan dipandang sebagai simbol perlawanan terhadap rezim Orde Baru, dan keberadaan Megawati Soekarnoputri sebagai figur sentral partai memperkuat citra partai sebagai pembawa semangat reformasi dan keadilan sosial. Visi dan misi PDI Perjuangan yang mengusung gagasan pengembalian kedaulatan rakyat, pengurangan kesenjangan sosial, serta pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan berbasis pada pemberdayaan ekonomi lokal, dianggap sejalan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kota Jambi pada masa itu. Hal ini menjadi faktor penting yang mendorong tingginya dukungan masyarakat terhadap PDI Perjuangan, khususnya di tengah suasana transisi politik nasional yang membuka ruang bagi lahirnya harapan baru terhadap perubahan sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan berpihak pada rakyat.<sup>97</sup>

Dalam pelaksanaan Pemilu di Kota Jambi, meskipun secara umum berlangsung tertib dan aman di seluruh TPS, tercatat sekitar 10 persen warga tidak menggunakan hak pilihnya, yang mencerminkan potensi pelanggaran pasif seperti kurangnya sosialisasi pemilu, tidak tersalurkannya undangan memilih (formulir C6), hingga minimnya fasilitas bagi warga dengan kondisi khusus seperti pasien RSU. Ketidakhadiran sejumlah pemilih juga disebabkan oleh kesibukan, bepergian ke luar kota, atau alasan kesehatan, yang mengindikasikan belum optimalnya perlindungan hak pilih secara menyeluruh. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit adanya pelanggaran aktif seperti kecurangan atau intimidasi, namun fakta ini menunjukkan adanya celah kelemahan dalam penyelenggaraan yang berpotensi mengurangi

---

<sup>97</sup> Ibid. Koran Independent, Juni 1999

kualitas demokrasi, terutama dalam hal partisipasi dan pemenuhan hak konstitusional warga.<sup>98</sup>

Dalam pengawasan kampanye pemilu, Panwaslu Kota Jambi mencatat bahwa pelanggaran administrasi mendominasi, terutama terkait pemasangan atribut kampanye yang melanggar aturan, seperti alat peraga yang dipasang di fasilitas umum, pohon, dan tempat ibadah, serta tidak sesuai dengan lokasi yang telah ditetapkan KPU. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh hampir seluruh partai politik peserta pemilu, dengan mayoritas pelanggaran berupa pemasangan spanduk, baliho, dan poster yang tidak sesuai ketentuan. Selain itu, banyak pelanggaran juga terjadi selama masa tenang, di mana masih ditemukan aktivitas kampanye terselubung oleh sejumlah partai. Panwaslu juga menegaskan bahwa meskipun pelanggaran ini bersifat administratif dan tidak sampai pada ranah pidana, tetap berpotensi mengganggu prinsip keadilan dan keteraturan dalam pelaksanaan pemilu yang demokratis dan jujur.<sup>99</sup>

Hasil pemilu pemilu di Kota Jambi PDI Perjuangan (PDIP) tampil dominan, menjadi peraih suara terbanyak untuk DPRD I dan II. Partai Golkar menempati posisi kedua, menunjukkan pengaruh sisa Orde Baru masih terasa. PAN dan PPP juga menunjukkan kekuatan signifikan, mencerminkan basis massa Islam dan reformasi di Kota Jami.<sup>100</sup> Pemilu 1999 dipilih langsung oleh rakyat, namun dalam format memilih partai politik, bukan calon legislatif individu. Sistemnya Proporsional tertutup rakyat mencoblos simbol partai, bukan nama calon.

#### **4.2 Dinamika Pemilu Legislatif 2004 di Kota Jambi**

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004 di Indonesia diselenggarakan dalam dua putaran karena pada putaran pertama tidak ada pasangan calon yang berhasil memperoleh lebih dari 50% suara, yang mana merupakan persyaratan utama untuk

---

<sup>98</sup> Koran Independent. Juni 1999

<sup>99</sup> *Op. Cit*

<sup>100</sup> *Ibid*

memenangkan pemilihan secara langsung sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 hasil amandemen. Sistem pemilihan dengan dua putaran ini dirancang untuk memastikan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat dan didukung oleh mayoritas rakyat, sehingga mencerminkan kehendak masyarakat secara luas. Apabila pada putaran pertama tidak ada pasangan calon yang mendapatkan suara mayoritas, maka pemilihan dilanjutkan ke putaran kedua, di mana hanya dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pada putaran pertama yang akan bersaing untuk memenangkan pemilihan dan mendapatkan mandat dari rakyat.<sup>101</sup>

Pemilu 2004 di Indonesia, termasuk di Kota Jambi, merupakan pemilihan umum yang penting karena mencakup pemilihan presiden dan legislatif secara bersamaan. Kesiapan menjelang pemilu ini melibatkan banyak persiapan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan KPU. KPU Kota Jambi kembali menjadi ujung tombak dalam mengatur proses pemilihan dengan memperhatikan pengalaman dari pemilu sebelumnya.<sup>102</sup>

Salah satu fokus utama dalam persiapan Pemilu 2004 adalah peningkatan kualitas daftar pemilih. KPU melakukan verifikasi data untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang berhak dapat memberikan suaranya. Upaya ini melibatkan kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk menjangkau kelompok-kelompok yang mungkin terabaikan.<sup>103</sup>

#### **Gambar 4. 1 Strategi pengawasan keliling**

---

<sup>101</sup> Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2004. Hlm 5-9

<sup>102</sup> Di Jambi, Kader Peserta Pemilu Berkonvoi, Diakses pada 22 Januari 2025. <https://www.liputan6.com/news/read/69521/di-jambi-kader-peserta-pemilu-berkonvoi>

<sup>103</sup> Penyelenggara Pemilu 2004 Adalah KPU, Pahami Pelaksanaan dan Hasilnya, Diakses pada 22 Januari 2025. <https://www.liputan6.com/hot/read/5514661/penyelenggara-pemilu-2004-adalah-kpu-pahami-pelaksanaan-dan-hasilnya>



Sumber: Koran Jambi Ekspers

Pemerintah kota dan aparat setempat, bekerja sama dengan penyelenggara pemilu daerah (KPU Daerah), berusaha keras memastikan distribusi logistik dan informasi berjalan lancar. Meski sempat terkendala keterlambatan surat suara di beberapa kelurahan, secara umum proses berlangsung tertib dan aman. Petugas KPSS bekerja dari pagi hingga malam dengan penuh dedikasi. Tidak hanya itu pihak pawanslu juga menggunakan pengendara pribadi untuk mengkoordinasi berjalannya pemilihan umum di setiap TPS, Bahwa ini sudah dijelaskan di bab III Dalam Pelaksanaan pemilu 2004 di Kota Jambi kemungkinan adanya kecurangan masih menjadi permasalahan. Pawaslu melakukan beberapa strategi yang mana dilakukan agar menghindari adanya kecurangan dan mengawasi jalannya pilpers pada saat itu. Salah satu strategi yang dilakukan pamwaslu yaitu adanya Gerakan pengawas keliling. Gerakan ini dimaksudkan menjaga keamanan PILPERS (pemilihan presiden) berjalan seksama dan mengurangi jika adanya kendala pada saat pemilihan.<sup>104</sup> Warga Kota Jambi kini tidak lagi hanya dihadapkan pada tiga pilihan seperti di masa lalu. Puluhan partai politik baru muncul, membawa wajah-wajah dan ide-ide segar. Dari

<sup>104</sup> Wawancara. Ansurullah (64 Tahun) Ketua Panwaslu Provinsi Jambi pada tanggal 09 Januari 2025

warung kopi hingga ruang kelas, diskusi politik menggema. Masyarakat mulai berani berbicara terbuka, mendebatkan visi partai, dan mempertanyakan rekam jejak tokoh-tokoh nasional.

**Gambar 4. 2 Calon peserta DPD di Kota Jambi 2004**

No. Urut.	Nama Calon Anggota DPD	Jumlah
1	Drs. H.A. Hasyim Hanafi	82,995
2	Hifni Hasan, SH	57,822
3	Zainul Chalikin	50,211
4	Nuzran Joher, S.Ag	137,018
5	Ismail Syafrudin, SP	69,925
6	Drs. H. Buchari Hasan	104,307
7	H.M Saman Chatib, SH	83,554
8	Muhammad Nasir	125,205
9	Drs. Ibrahim Lakoni	34,900
10	Ir. Arsyad	35,773
11	Drs. H. Hasan	113,379
12	Jaya Kasumantri, S.Pd	47,490
13	M. Chudori	37,539
14	Dra. Hj. Nyimas Ena, MM	125,548
15	Syahri Asy	16,733
16	Prof. Dr. H. Sulaiman Abdullah	91,141
	JUMLAH	<b>1,213,540</b>

**Sumber: KPU Batanghari**

Sementara itu, pemilu tahun 2004 mencatat sejarah baru karena untuk pertama kalinya rakyat Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Ini adalah salah satu hasil dari amandemen UUD 1945 yang memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Selain itu, jumlah partai politik peserta pemilu juga jauh berkurang dibandingkan tahun 1999, yaitu hanya 24 partai. Hal ini mencerminkan adanya seleksi alam dan penyaringan partai-partai yang dianggap tidak efektif dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Penyelenggaraan pemilu pun menjadi lebih sistematis, dengan pemisahan antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dalam dua tahap yang berbeda.<sup>105</sup>

Pemilihan legislatif pada tahun 2004 adalah bagian dari Pemilu yang lebih demokratis dan modern dibandingkan pemilu sebelumnya. Pemilu legislatif ini

<sup>105</sup> Ibid, Pahrudin.

diselenggarakan pada 5 April 2004, dan merupakan pemilu pertama yang dilakukan secara terpisah dari pemilu presiden. Jadi rakyat Indonesia memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD terlebih dahulu, baru beberapa bulan kemudian memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Dalam pemilu legislatif ini, masyarakat memilih: Anggota DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat) Dipilih melalui daftar partai dan nomor urut calon di setiap daerah pemilihan (dapil). Jumlah anggota DPR yang dipilih adalah 550 orang dari berbagai dapil di seluruh Indonesia. Pemilih mencoblos simbol partai dan/atau nama calon legislatif (caleg) yang mereka pilih. Anggota DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah) Berbeda dari DPR, calon DPD tidak mewakili partai politik, melainkan perseorangan. Setiap provinsi memilih 4 orang anggota DPD, dan mereka bersifat independen (non-partisan). Pemilih langsung mencoblos nama calon DPD yang ada di surat suara.<sup>106</sup>

Sistemnya serupa dengan pemilihan anggota DPR RI, yaitu berdasarkan daftar calon dari partai di masing-masing dapil. Pemilu legislatif 2004 diikuti oleh 24 partai politik, jumlah yang lebih sedikit dibandingkan Pemilu 1999 yang mencapai 48 partai. Ini karena adanya verifikasi ketat oleh KPU, untuk memastikan partai-partai peserta benar-benar layak dan memenuhi syarat. di kota Jambi sendiri hanya ada 16 peserta. Secara keseluruhan, pemilu legislatif 2004 ini memperkenalkan sistem pemilu yang lebih transparan, memberi lebih banyak ruang bagi rakyat untuk menentukan wakilnya secara langsung, serta menjadi bagian penting dalam transisi demokrasi.<sup>107</sup>

**Tabel 4. 1 Daftar calon anggota DPRD Kota Jambi pada pemilu 2004**

No. Urut calon	Nama Partai & Calon
1	<b>Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI</b>
	<b>Marhaenisme)</b>
	Alfian, A.Md
	Drs. H. A. Thohir Suandy
	Gusnita

<sup>106</sup> Laporan Pemilu legislatif. Di lampiran Hal 92.

<sup>107</sup> Laporan Pemilu legislatif. Kpu Batanghari 2004.

2	<b>Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD)</b>
	Roida Pane
	Emmy Sri Mauli Tambunan, SH
3	<b>Partai Bulan Bintang (PBB)</b>
	Drs. H. Zainul Imron
	M.Zen, SH, MH
	M.Rifa'i
	Hasan Basri Sahib, SH
	Ir.M. Riva'i
	Fareha
	Khairun Najwa, S.Sos
4	<b>Partai Merdeka</b>
	Siti Sulasmi
	Drs. Bulhasan Rachman
	Hj. Marina
	Zainal Makmur
5	<b>Partai Persatuan Pembangunan (PPP)</b>
	Drs. Arief Hassan
	Kol. (Purn) Suhardi,SH
	Rifa' i Arbain
	Nurtasnim
	Hj. Titin Suprihartini
	Tesnita
6	<b>Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK)</b>
	Riza,SE
	Rahmi, SH
	Enny Surahmi, SE
	Suyata Bahman Thaib
7	<b>Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB)</b>
	Donny Pasaribu
	Nursyamsiah
8	<b>Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK)</b>
	Mirza Haviz, SH, MM
	Noor Hadi Sigra Prawiranegara, SE
	Lenni Marlina, SP
9	<b>Partai Demokrat</b>
	Eddy Haryanto, SH
	Leonny ML. Sandy B.
10	<b>Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP</b>
	<b>Indonesia)</b>

	H.M. Hasbi, SH
	Hj. Nuraini Mugni Ahmad
	Abdul Aziz Thaib
	Sardana
11	<b>Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)</b>
12	<b>Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI)</b>
13	Tri Hartaty, ST
	<b>Partai Amanat Nasional (PAN)</b>
	H. Chairul Naim. M. Anik, SH
	Syafri Sofyan, SH
	Dedy Dwiadi
	Solikhatun, SE
14	<b>Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)</b>
	H. Libran, SE
	Desi. MS
	Candra Jaya, SP
	Rudi Ardiansyah, SH
	Midrawati
15	<b>Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)</b>
	M. Indrawan Husairi, SP
	Emelda Raudhati, ST.MPd
	KH. Muzakir, BA
	A. Thalib, SH
	Suhaimi Ja'far
	Novifalisah Aris Tanti. AMd
16	<b>Partai Keadilan Sejahtera (PKS)</b>
	Henri Masyhur
	Tursiman
	Rail Nasution
	Sri Rahayu, SE
	Hermansyah, SE
	Iskandar Purnama, SP
17	<b>Partai Bintang Reformasi (PBR)</b>
	Drs. Jefrizen
	Slamet Pribadi
	Hj. Roslaini MGR, BA
	Taufik Hidayat, S.Pd
	Nyimas Nurhayani. D
18	<b>Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)</b>

	H. Suwarno Soerinta
	Kosasih Joesman
	Hotman P. Sitanggang, SH
	Heriyono, SE
	Sunarti
	dr. HR. Bambang Priyanto
	Dorni Sefrini
	Drs. Asnawi Achmad, MDP
19	<b>Partai Damai Sejahtera (PDS)</b>
	Ir. FDP. Hutabarat
	Edwin Budianto, SH
	Deddy Dusherman
	Elizabeth Tjahjadarmawan, S.Si
20	<b>Partai Golongan Karya (Golkar)</b>
	H. Zoerman Manap.
	H. Muhammad Saman.
	H.A. Rahman Albani, S.Ag
	Ir. BH. Tampubolon
	Hj. Asiah AK. Djuwainy
	H.Abdullah Syargawi Ali, B.Sc
	Kemas Farouq
	Petrus Hilman Dapot Tuah Purba
	Dra. Maimaznah
21	<b>Partai Patriot Pancasila</b>
	Effendi Hatta
	Indra Armendaris, SH
	Ir. Paul Andre Marisi
	Kusnadi
	Nurlena, SE
22	<b>Partai Sarikat Inddonesia (PSI)</b>
	H. Muhammad Yusuf Husin, SH
	KMS. Firdaus
	Joko Supriyanto, SAg.
	Wahyu Diana, SE
	Eva Haryanti, A.Md
	Ilhamdan
	Ir. Abdul Karim
23	<b>Partai Persatuan Daerah (PPD)</b>
	Dra. Sufiani
	Supianto, S.Sos

	Hj. Hinopifah, BBA
	M. Amin Mualim, SH
24	<b>Partai Pelopor</b>
	Drs. M. Saleh Marzuk
	Drs. Sutrisno
	Drs. M. Saleh Rifai
	Margo Pattiradjawane

**Sumber:Kpu Batanghari 2004**

Tabel ini memuat daftar partai politik peserta Pemilu 2004 beserta nama-nama calon legislatif (caleg) mereka yang mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi. Dalam pemilu tersebut, terdapat 24 partai politik nasional yang mengajukan wakilnya untuk memperebutkan kursi legislatif di tingkat kota. Setiap partai politik yang terdaftar dalam tabel ditampilkan berdasarkan nomor urut partai, sesuai dengan nomor yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat Pemilu 2004. Di bawah nama partai, dicantumkan nama-nama calon legislatif dari partai tersebut yang mewakili daerah pemilihan Kota Jambi.

Dalam pemberitaan mengenai Pemilu 2004, pelanggaran pemilu kembali mencuat dengan munculnya laporan-laporan dari berbagai daerah di luar Provinsi Jambi, seperti yang diterima oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Laporan tersebut meliputi dugaan manipulasi suara, keterlibatan aparat dalam politik praktis, serta pelanggaran administrasi dan etik oleh penyelenggara pemilu. Demonstrasi juga digelar oleh sejumlah mahasiswa di Jambi yang menuntut penyelesaian kasus pelanggaran pemilu dan transparansi proses rekapitulasi suara. Mereka menilai bahwa pelanggaran yang terjadi tidak hanya merugikan peserta pemilu tertentu, tetapi juga mencederai prinsip demokrasi dan keadilan. Panwaslu pun menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti laporan-laporan tersebut guna menjaga integritas proses pemilu secara menyeluruh.<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup> Koran Jambi Ekspers. April 2004

Dalam pemberitaan dari Jambi Ekspres, terungkap adanya indikasi pelanggaran pemilu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) RSUD Raden Mattaher, di mana proses pemungutan suara berjalan tanpa kehadiran saksi dari partai politik. Ketidakhadiran saksi ini menjadi sorotan karena dapat memengaruhi transparansi dan integritas proses pemungutan serta penghitungan suara. Selain itu, keberadaan beberapa pemilih yang diragukan validitasnya dan ketidakterlibatan pengawasan yang memadai menimbulkan kecurigaan publik terhadap kemungkinan manipulasi hasil suara. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Jambi pun turut menyayangkan kondisi ini dan menegaskan perlunya evaluasi serta tindakan tegas agar kejadian serupa tidak terulang demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.<sup>109</sup>

#### **4.3 Perbandingan dan Implikasi Dinamika Pemilu 1999 dan 2004 di Kota Jambi**

Pemilu 1999 dan 2004 merupakan dua tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia, termasuk di Kota Jambi. Kedua pemilu ini mencerminkan peralihan dari sistem otoriter Orde Baru menuju sistem demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Perbedaan paling mencolok antara keduanya terletak pada mekanisme pemilu, di mana Pemilu 1999 masih menggunakan sistem proporsional tertutup, sementara Pemilu 2004 mulai menerapkan pemilihan presiden secara langsung dan sistem proporsional terbuka terbatas. Selain itu, jumlah partai peserta juga berkurang drastis dari 48 partai pada tahun 1999 menjadi 24 partai pada tahun 2004, menandakan adanya proses penyaringan yang lebih ketat oleh KPU terhadap kelayakan partai politik peserta pemilu.<sup>110</sup>

Dari sisi partisipasi masyarakat, kedua pemilu sama-sama mencatatkan angka keikutsertaan yang tinggi, tetapi memiliki karakter yang berbeda. Pada Pemilu 1999,

---

<sup>109</sup> Koran Jambi Ekspres edisi. April 2004

<sup>110</sup> Op.cit. Pahrudin

antusiasme warga Kota Jambi sangat tinggi karena ini merupakan pemilu pertama setelah runtuhnya Orde Baru. Warga memadati TPS sejak pagi, bahkan banyak aktivitas ekonomi terhenti karena masyarakat memilih fokus mengikuti pemilu. Sementara itu, pada Pemilu 2004, partisipasi juga tetap tinggi, tetapi masyarakat tampak lebih kritis dan terbuka dalam berdiskusi soal visi dan rekam jejak calon legislatif maupun calon presiden. Ini menunjukkan adanya pendewasaan politik masyarakat Kota Jambi dari waktu ke waktu.<sup>111</sup>

Secara kelembagaan, terjadi perubahan penting dari segi penyelenggaraan dan pengawasan pemilu. Pada 1999, KPU masih berisi perwakilan dari pemerintah dan partai politik, sedangkan pada 2004, KPU menjadi lebih independen dan profesional. Panwaslu juga memainkan peran lebih aktif dalam mengawasi jalannya pemilu, termasuk strategi “pengawasan keliling” untuk memantau potensi pelanggaran. Peningkatan sistem pengawasan ini turut mendukung transparansi dan akuntabilitas pemilu, meskipun masih ditemukan pelanggaran administratif dan teknis, seperti keterlambatan logistik serta ketidakhadiran saksi partai di beberapa TPS.<sup>112</sup>

Namun demikian, baik pada 1999 maupun 2004, masih ditemukan tantangan serupa, seperti masalah daftar pemilih tetap (DPT), tidak terdistribusinya undangan memilih, hingga praktik kampanye terselubung saat masa tenang. Di TPS RSUD Raden Mattaher pada tahun 2004 misalnya, dilaporkan adanya pemungutan suara tanpa saksi partai dan daftar pemilih yang diragukan keabsahannya. Hal ini menunjukkan bahwa

---

<sup>111</sup> Ibid

<sup>112</sup> Koran Jambi Ekspres, Juni 1999. Lihat Lampiran hlm. 72.

kualitas teknis pelaksanaan pemilu masih memerlukan perbaikan, terutama dalam menjamin hak pilih dan integritas suara rakyat.<sup>113</sup>

Dari hasil pemilu, PDI Perjuangan tampil dominan dalam kedua pemilu di Kota Jambi, menunjukkan keberhasilan partai tersebut dalam membangun ikatan emosional dengan masyarakat pasca-Orde Baru. Namun, pada 2004 mulai muncul kompetitor kuat seperti Partai Demokrat, PKS, dan PAN yang memperlihatkan pergeseran kekuatan politik lokal. Hal ini menandakan adanya perubahan peta kekuatan politik di Kota Jambi, dari yang sebelumnya dikuasai satu-dua partai besar menjadi lebih plural dan kompetitif. Dampaknya, persaingan politik menjadi lebih sehat dan membuka peluang bagi lahirnya tokoh-tokoh lokal baru.<sup>114</sup>

Implikasi dari dinamika dua pemilu ini sangat signifikan terhadap perkembangan demokrasi lokal di Kota Jambi. Pemilu 1999 menjadi tonggak awal bagi masyarakat dalam merasakan kebebasan politik pasca-reformasi, sedangkan Pemilu 2004 memperkuat konsolidasi demokrasi melalui pemilihan langsung. Masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek pemilu, tetapi turut menjadi subjek politik yang aktif dalam mengawal proses demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa demokratisasi di tingkat lokal telah mulai berakar, meskipun tetap menghadapi tantangan struktural dan teknis yang harus dibenahi secara berkelanjutan.<sup>115</sup>

Di sisi lain, keberadaan media massa dan keterlibatan masyarakat sipil menjadi pembeda antara dua pemilu tersebut. Pada tahun 2004, ruang pemberitaan

---

<sup>113</sup> Koran Jambi Ekspres, April 2004.

<sup>114</sup> Ibid

<sup>115</sup> Hendra Sudrajat, dkk, 2023. Politik Hukum Pemilu. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi. Hlm 30

menjadi lebih terbuka dibanding tahun 1999. Media lokal seperti Jambi Ekspres dan Independent memainkan peran penting dalam membentuk opini publik serta menjadi pengawas sosial terhadap proses demokrasi. Selain itu, keterlibatan organisasi masyarakat, akademisi, dan mahasiswa dalam memantau jalannya pemilu memperkuat kualitas demokrasi lokal dan menjadi bentuk kontrol publik terhadap penyelenggaraan pemilu.<sup>116</sup>

Perubahan sistem pemilu juga berdampak terhadap strategi kampanye politik. Jika pada 1999 kampanye cenderung bersifat mobilisasi massa dan sentimen reformasi, maka pada 2004 kampanye mulai diarahkan kepada program kerja dan citra kandidat. Pendekatan personalisasi politik semakin kentara, terutama dalam pemilu presiden yang untuk pertama kalinya dilakukan secara langsung. Para calon legislatif dan eksekutif di Kota Jambi mulai menyusun strategi yang lebih sistematis dan terukur dalam menyasar basis pemilih.<sup>117</sup>

Aspek lainnya yang mencolok adalah pengaruh teknologi dan informasi dalam dinamika pemilu 2004. Meski penggunaan internet dan media sosial belum semasif era sekarang, namun pemanfaatan media elektronik seperti radio dan televisi lokal mulai menjadi bagian dari strategi komunikasi politik. Hal ini menunjukkan adanya proses modernisasi dalam praktik kampanye dan komunikasi politik yang mulai merambah daerah-daerah, termasuk di Kota Jambi.<sup>118</sup>

Selanjutnya, perbandingan kedua pemilu ini memperlihatkan perubahan hubungan antara pemilih dan wakilnya. Pada Pemilu 1999, masyarakat lebih memilih

---

<sup>116</sup> Wawancara dengan Deni Rahmat, Ketua KPU Kota Jambi, 7 Februari 2025.

<sup>117</sup> Wawancara dengan Deni Rahmat, Ketua KPU Kota Jambi, 7 Februari 2025.

<sup>118</sup> Laporan Pemilu Legislatif 2004, KPU Batanghari.

berdasarkan simbol partai dan ideologi, sedangkan pada 2004 pemilih mulai melihat rekam jejak individu calon. Sistem proporsional terbuka yang diperkenalkan memungkinkan pemilih mencoblos nama caleg, bukan sekadar simbol partai. Ini mendorong caleg untuk lebih aktif turun ke masyarakat dan membangun kedekatan langsung dengan konstituennya.<sup>119</sup>

Secara keseluruhan, perbandingan dinamika Pemilu 1999 dan 2004 di Kota Jambi menunjukkan kemajuan signifikan dalam hal pelibatan masyarakat, kualitas penyelenggaraan, dan demokratisasi politik lokal. Namun, berbagai tantangan tetap menyertai, mulai dari aspek teknis hingga kualitas pemilih dan integritas penyelenggara. Oleh karena itu, pemilu bukanlah titik akhir dari demokrasi, melainkan bagian dari proses panjang yang membutuhkan penguatan institusi, peningkatan pendidikan politik, serta komitmen semua pihak terhadap nilai-nilai demokrasi.<sup>120</sup>

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

---

<sup>119</sup> Wawancara dengan Deni Rahmat, Ketua KPU Kota Jambi, 7 Februari 2025.

<sup>120</sup> Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2004, hlm. 5–9.

Secara umum, kondisi politik di Jambi pasca-reformasi ditandai oleh peralihan dari sistem otoritarian ke sistem yang lebih demokratis, peningkatan partisipasi masyarakat dalam politik, serta tantangan baru dalam hal desentralisasi dan dinamika politik lokal. Meskipun ada kemajuan dalam hal kebebasan berpolitik, politik dinasti, korupsi, dan ketegangan sosial tetap menjadi isu yang perlu dihadapi dalam pembangunan politik di provinsi ini.

Pada masa reformasi, persiapan Pemilu di Kota Jambi mengalami perubahan signifikan yang mencerminkan pergeseran menuju sistem demokrasi yang lebih terbuka dan langsung. Pemilu 1999, sebagai pemilu pertama pasca-Orde Baru, memulai perubahan besar dalam sistem politik Indonesia, termasuk di Jambi. Masyarakat Kota Jambi mulai merasakan pentingnya hak suara mereka, dan partisipasi politik semakin meningkat. Namun, tantangan seperti politik uang, politik dinasti, dan pendidikan pemilih masih menjadi isu yang harus terus dihadapi dalam proses demokrasi yang berkembang.

Pelaksanaan Pemilu di Kota Jambi pada masa reformasi mencerminkan pergeseran besar dalam sistem politik Indonesia, dengan peningkatan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan Pemilu di Kota Jambi pada masa reformasi mencerminkan transisi menuju demokrasi yang lebih inklusif dan terbuka, meski masih ada tantangan yang perlu diatasi. Pemilu yang dilaksanakan dengan sistem multipartai dan Pilkada langsung memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk lebih aktif dalam proses politik. Meskipun masih ada tantangan seperti politik uang, politik dinasti, dan keterbatasan pendidikan politik, pemilu di Kota Jambi pada era reformasi

menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, transparansi dalam penyelenggaraan pemilu, serta menguatnya peran media dan lembaga pengawas. Di masa depan, penguatan kualitas demokrasi, pendidikan politik yang lebih baik, dan pengawasan yang ketat akan menjadi kunci dalam memastikan Pemilu di Kota Jambi dapat berjalan dengan adil dan berkualitas. Pemilu 1999 dipilih langsung oleh rakyat, namun dalam format memilih partai politik, bukan calon legislatif individu. Sistemnya Proporsional tertutup rakyat mencoblos simbol partai, bukan nama calon. Pemilu 2004 di pilih langsung oleh rakyat partai dan individu calon legislatif. Sistemnya Proporsional terbuka rakyat mencoblos nama caleg langsung.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Sumber arsip**

Koran Jambi Ekspers dan Independent 1999

Koran Jambi Ekspers dan Independent 2004

Dokumen bentuk file hasil Pemilu 2004 DPR RI

Dokumen bentuk file Daftar Caleg

Dokumen bentuk file Laporan Pemilu legislatif

Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi. Laporan Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2004. Jambi: KPU Kota Jambi, 2004.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Wein Arifin (45 Tahun) Ketua Bawaslu Kota Jambi pada tanggal 18 Desember 2024

Wawancara dengan Ansorullah (64 Tahun) Ketua Panwaslu Provinsi Jambi pada tanggal 09 Januari 2025

Wawancara dengan Deni Rahmat (38 Tahun) Ketua KPU Kota Jambi, 7 Februari 2025.

### **Buku**

Siti Zuhro, dkk. 2022. *Dinamika Demokrasi, Pemilu Dan Otonomi Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Leutika Prio)

Rozali Abdullah. 2009. *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*: Jakarta: Rajawali Press.

Jurdi, Fajlurrahman. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Susilastuti, dkk. 2016. *Pengantar Ilmu Politik Membedah Paradigma Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Pembangunan (UPN)

R. Siti Zuhro, dkk. Model Demokrasi Lokal. Jakarta: PT THC Mandiri, 2011

Dwiyanto, A., dkk. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2002,

Kunto wijoyo. 2005. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang.

Hartono Margono, Mujilan dan J.R. Chaniago, *Sejarah Sosial Jambi : Jambi sebagai Kota Dagang*, Jakarta : Depdikbud (1984)

Syamsiddin Haris, Partai, Pemilu, Dan Parlemen Era Reformasi, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia 2014

Crouch, Harold. (2010). *Tentara dan Politik di Indonesia*. Cornell University Press. Amerika Serikat

Amin Suprihatini, 2008. Pemilu dari Masa ke Masa, Jakarta. Penerbit: Cempaka Putih.

Idrus, H. A. (1996). Kamus Umum Baku Bahasa Indonesia. Surabaya: Bintang Usaha.

Agustino, L. (2009). *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Pahrudin, Potret Jambi: Bunga Rampai Kajian Sosial, Politik, dan Kebijakan di Negeri Sepucuk Jambi Sembilan Lurah, Yogyakarta: Jivaloka, 2022

### **Skripsi**

Fiski Priyanti. 2005. Pelaksanaan Pemilihan umum di Indonesia.

Rima Fitriana. 2021. Strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Jambi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Ditengah Pandemi Covid – 19 (Studi Kasus Pemilihan Gubernur Tahun 2020 Di Kota Jambi)

Edwina Putri. 2018. Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Walikota Jambi Tahun 2018.

Fiska Friyanti. 2018. Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Dalam Sejarah Nasional

### **Jurnal**

Muhamad Hakiki. 2016. Islam dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim dan Perkembangannya di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 1 (1). 4-5

Simamora, Janpatar, 2014. Menyongsong Rezim Pemilu Serentak, *Jurnal RechtsVinding*, 3 (1). 28-42

Jovano. Dkk. 2022. Penerapan Pemilu di Indonesia Masa Reformasi. Wacana:Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin, 9 (2) (2022): 502, doi: /10.37304/wacana.v9i2.7766

- Ikhsan Sirot & Hamdan Tri Atmaja. 2020. Reformasi Tahun 1998: Peranan Dan Dampaknya Bagi Kota Solo. *Journal Of Indonesian History* 9 (2). 102
- Muhammad Afied Hambali. 2014. Pemilukada Pasca Reformasi Di Indonesia. *Journal : Rechstaat Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unsa*. 8 (1).
- Ismail. Yuridis. 2015. Sistem Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pada Era Orde Baru Dengan Era Reformasi. *Jurnal. JOM Fakultas Hukum Vol II* (2).
- Siti Heidi Karmela, *Kehidupan Ekonomi Penduduk Dalam Setiap Periodisasi Sejarah Jambi, Jurnal Ilmiah Dikdaya*, Vol. 4, No. 01 (2015)
- Liddle, William R., & Mujani, Saiful. (2005). *Transisi Demokrasi Indonesia: Studi Kasus Reformasi Politik dan Politik Pemilu*. *Journal of Asian Studies*, 64(4), 793-813.
- Sigit Pamungkas. (2005). "Dinamika Pemilu 1999 di Indonesia: Studi Kasus di Kota Jambi." *Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 45-60.
- Muhammad Bahrul Ulum. 2021. Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Setelah Reformasi: Kesenambungan dan Perubahan. *Jurnal Hukum*. Vol. 4 No. 2 (2021): 309-343, DOI: 10.22437/ujh.4.2.309-343

### **Website**

- Anonim, BPS Kota Jambi Dalam Angka Tahun 1999. Hlm 12, <https://jambi.bps.go.id/id/publication/2011/02/21/492a65707bd8ac222aba52fb/jambi-dalam-angka-1999.html> diakses pada tanggal 03 mei 2025
- Anonim, BPS Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2004. Hlm 40, <https://jambikota.bps.go.id/id/publication/2009/08/06/3214298f76f33701c9c6aae7/kota-jambi-dalam-angka-2004.html> diakses pada tanggal 03 mei 2025
- Drs.H.Junaidi.T.Noor.MM. *Sejarah Kota Jambi - Pemerintah Kota Jambi*, diakses pada tanggal 15 November 2024 ([jambikota.go.id](http://jambikota.go.id))
- Sonny Harry B. Harmadi, *Modul Pengantar Demografi* diakses pada <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfmkaj/https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ESPA4535-M1.pdf>

Anonim, BPS Kota Jambi Dalam Angka Tahun 1998, hlm. 34, <https://jambi.bps.go.id/id/publication/2011/02/21/352186e95addaec44d3de8df/jambi-dalam-angka-1998.html> diakses pada tanggal 03 Mei 2025.

Anonim, BPS Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2001. <https://jambi.bps.go.id/id/publication/2011/02/21/9e929c543254ddd92c293b30/jambi-dalam-angka-2001.html> diakses pada tanggal 03 Mei 2025

Anonim, BPS Kota Jambi Tahun 2000, <https://jambi.bps.go.id/id/publication/2011/02/21/72848e20bf94bb2973b5b0f8/jambi-dalam-angka-2000.html> diakses pada tanggal 03 Mei 2025

Sejarah Partai Amanat Nasional di Jambi,” Repository Universitas Jambi, diakses dari <https://repository.unja.ac.id/34183/7/BAB%20II.pdf> pada tanggal 4 Mei 2024.

Pemilu legislatif Indonesia 1999, [https://en.wikipedia.org/wiki/1999\\_Indonesian\\_legislative\\_election](https://en.wikipedia.org/wiki/1999_Indonesian_legislative_election) diakses pada tanggal 5 Mei 2024.

Pemilu 1999, Pemilu Pertama Pasca-Orde Baru, Diakses pada 24 Januari 2025. <https://www.kompas.id/baca/foto/2023/06/07/arsip-foto-kompas-pemilu-1999-pemilu-pertama-paska-orde-baru?>

Veri Junaidi. 2013. “Pelibatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu,” diakses pada tanggal 04 mei 2025, [Pelibatan dan partisipasi masyarakat PDF copied from the Internet by Library of Congress Jakarta Office on 3/5/2018.](#)

Kompas, Lika-liku Pemilu Indonesia dari Masa ke Masa, diakses pada tanggal 4 mei 2025, [https://www.kompas.id/baca/riset/2024/02/13/lika-liku-pemilu-indonesia-dari-masa-ke-masa?status=sukses\\_login&status\\_login=login&loc=hard\\_paywall](https://www.kompas.id/baca/riset/2024/02/13/lika-liku-pemilu-indonesia-dari-masa-ke-masa?status=sukses_login&status_login=login&loc=hard_paywall)

Komisi Pemilihan Umum, diakses pada tanggal 4 mei 2025, <https://www.kpu.go.id/page/read/1114/pemilu-2004>

Di Jambi, Kader Peserta Pemilu Berkonvoi, Diakses pada 22 Januari 2025. <https://www.liputan6.com/news/read/69521/di-jambi-kader-peserta-pemilu-berkonvoi>

Penyelenggara Pemilu 2004 Adalah KPU, Pahami Pelaksanaan dan Hasilnya, Diakses pada 22 Januari 2025.

<https://www.liputan6.com/hot/read/5514661/penyelenggara-pemilu-2004-adalah-kpu-pahami-pelaksanaan-dan-hasilnya>

## **Lampiran**

**Lampiran 1.** Koran pemberian hak suara secara langsung pada pemilu tahun 4 Januari 1999



**Sumber:** Koran Jambi Ekspres 1999, Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah

**Lampiran 2.** pemberian hak suara secara langsung pada pemilu tahun 6 April 2004



Sumber: Koran Jambi Ekspres 2004, Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah

**Lampiran 3.** Strategi Pengawasan Keliling 5 Juli 2004

# Hari ini, Panwas Siaga Satu

## Terapkan Strategi Pengawasan Keliling

JAMBI-Panitia Pengawas Pemilu (Panwas Pemilu) Kota Jambi, akan menerapkan strategi pengawasan keliling di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang akan berlangsung hari ini (5/7).

Strategi pengawasan keliling ini, menurut Wakil Ketua Panwaslu Kota Jambi, Drs Kasful Anwar MPd dilakukan dalam rangka mengawasi secara seksama jalannya pilpres.

"Kami akan personil kita sangat terbatas, namun dengan keterbatasan tersebut kita akan optimalkan untuk mengatasi kendala yang ada. Makanya, sesuai dengan hasil rapat koordinasi Panwaslu se Kota Jambi dengan melibatkan panwaslu kecamatan, kami menyepakati untuk menerapkan strategi pengawasan secara keliling di semua TPS dalam Kota Jambi," ujar Kasful kepada koran kemarin.

Lebih lanjut Kasful mengatakan, strategi pengawasan keliling ini, dianggap efektif dan efisien dalam mengawasi jalannya pelaksanaan pilpres. Diharapkan semua personil panwaslu di semua tingkatan dapat menjalankan tugas dengan baik.

Untuk melaksanakan pengawasan keliling ini, Kasful mengatakan bahwa setiap personil panwaslu akan menggunakan sepeda motor dalam mengawasi jalannya pilpres.

"Mengingat fasilitas dan dana operasional bagi panwaslu

terbatas, jadi kami akan menggunakan sepeda motor pribadi dalam menjalankan pengawasan di semua TPS. Semua personil akan kita terjunkan, sebelum pelaksanaan pencoblosan di semua TPS," sebutnya.

Dosen IAIN STS Jambi ini juga mengatakan, selain menerapkan strategi pengawasan keliling, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian di semua sektor dalam Kota Jambi dalam rangka turut membantu mengawasi jalannya pelaksanaan pilpres. Selain itu, pihaknya juga akan menempatkan sejumlah personil di beberapa titik yang rawan. "Pengalaman pada pengawasan pemilu legislatif lalu, ada beberapa titik rawan yang menjadi pengawasan prioritas kami. Untuk itu, peran serta masyarakat serta aparat kepolisian sangat diharapkan dalam membantu jalannya pengawasan pilpres ini," harap Kasful. (wan)





## KEMBAREN

PUSAT PENDIDIKAN BISNIS

### DIBUKA KELAS BISNIS

#### Komputer

- OFFICE 2000  
( Words, Excel, Acces, Power Point, Page Maker )
- Programing      - Tehnisi Komputer
- Visual Basic      - Merakit, Menginstall,
- Visual Foxpro      - Perbaikan Komputer

MENERIMA M

Drs. I

(Ketua U

Drs. H.

(Ketua I

Mengaj

peluang

Sumber: Koran Jambi Independet Pemilu Presiden 2004

Lampiran 4. Kondisi TPS di Kota Jambi 20 September 2004



Sumber: Koran Jambi Independent 2004

**Lampiran 5. Koran Jambi Ekspers 5 Juli 2004**

## Reorganisasi

### Delapan Anggota PPK di Kota Jambi

**JAMBI**-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jambi resmi melakukan penggantian antar waktu (PAW) terhadap sejumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tiga kecamatan dalam Kota Jambi. Para anggota PPK yang dinilai bermasalah itu adalah PPK Telanaipura, Kota Baru dan Pasar Jambi.

Hal ini dilakukan karena PPK tersebut pada pemilu legislatif belum lama dinilai bermasalah dengan terbuktnya dugaan pengelembungan suara untuk partai dan caleg tertentu.

"Ya, ada tiga PPK yang diganti atau di PAW. Namun tidak seluruh anggota PPK setempat yang diganti. Masih sda anggota PPK setempat yang dipertahankan," tukas anggota KPU Kota Jambi Drs A Shomad kepada koran ini, kemarin.

Dirincikan Shomad, penggantian di PPK Tenalaipura dilakukan terhadap tiga orang yaitu Nurhadi Risman, Rico Utra dan Nurdin yang digantikan oleh Zulkarnain SE, Firdaus dan Rahman Effendi SH. Sedangkan dua anggota PPK Telanaipura lainnya atas nama Oktavianus dan Ali Fahmi masih dipertahankan.

Sekedar mengingatkan PPK Tenalaipura diduga melakukan pengelembungan suara untuk PPP sehingga PKPB yang merasa dirugikan tidak menerima kenyataan tersebut dan melakukan gugatan ke MK. Akhirnya gugatan PKPB di MK diterima dan berhak meraih tambahan stau kursi DPRD Provinsi Jambi melalui daerah pemilihan Kota Jambi.

Di PPK Kota Baru yang tersandung kasus dugaan pengelembungan suara Partai PIB yang diprotes oleh PAN juga mengalami penggantian sejumlah anggota PPK. Ada empat orang anggota PPK yang diganti. Para anggota PPK Kota Baru dari Sahirman SAg, Ir Edward Murod, Dedy Irfan Sag dan Zaidun Jawaz digantikan oleh Amri SE, Bimo Sakti Sos dan Rahmat Suwito SE.

Penggantian juga dilakukan di PPK Pasar Jambi. Namun, hanya satu nama yang diganti yakni dari Antony ke Herry Akbar SAg. "Ini semua demi terciptanya pemilu yang benar-benar langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil," imbuh Shomad. (top)

Sumber:Koran Jambi Ekspres 2004

Lampiran 6. Koran Independent 8 Juni 1999



hilang' dari jalanan. Demikian pula dengan suasana pertokan yang rata-rata memilih 'tutup' ketimbang buka.

Tapi, di berbagai sudut kota sampai daerah pelosokan, warga masyarakat terlihat ramai berduyunduyun dan berkelompok pada tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan suara dan hak pilihnya sebagai warga negara.

Hal ini tidak terlepas dari upaya masyarakat Jambi untuk turut berperan serta dalam hajat besar pemilu 1999 yang akan menentukan nasib bangsa dan negara pada masa-masa mendatang.

"Yang jelas pada hari ini semua kegiatan masyarakat lebih banyak tercurah untuk memberikan suara mereka masing-masing," kata Gustian mahasiswa Universitas Batanghari kepada *Independent*, kemann.

Karena, ia menuturkan, sudah saatnya setiap warga negara mempergunakan suara dan hak pilih dalam pemilu 1999 yang merupakan perjalanan sejarah bangsa dan negara.

Hal senada juga dikemukakan Rusdian, salah seorang pegawai yang merasakan suasana demokrasi benar-benar terasa merasuk dalam pemilihan kali ini. "Masyarakat bisa menentukan pilihan secara bebas sesuai dengan hati nurani," paparnya.

Sementara menurut Nelly Akbar, salah seorang karyawan swasta, pemilihan kali ini diharapkan benar-benar dapat berlangsung secara jujur agar mampu membawa bangsa dan negara ke arah perbaikan. "Paling tidak demokrasi sudah tercermin secara langsung," katanya.

"Tapi yang terpenting lagi, momentum pemilu 1999, ini merupakan tonggak sejarah yang bakal menentukan nasib bangsa dan negara, untuk itu setiap warga negara perlu berperan secara aktif dalam memicu pemilu yang berlangsung aman, luber dan jujur," papar alumnus Universitas Jambi ini serius.

Menurut dia, partai manapun yang akan menang bukan masalah. "Yang terpenting partai yang akan keluar sebagai pemenang akan menunjukkan perubahan bagi perjalanan bangsa dan negara ke arah yang lebih baik," ujar dia lagi.

Yang jelas, suasana pemilihan umum di Jambi kemarin berjalan lancar dan aman, semenjak pukul 08.00 WIB masyarakat sudah banyak yang mendatangi TPS-TPS untuk menyalurkan aspirasi politik masing-masing.

(Bersambung ke hal. 3 kol 5)

Sumber: Koran Independent 1999

Lampiran 7. Koran Jambi Ekspres dan Independent 1999 dan 2004



**Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah**

### **Lampiran 8. Dokumen Laporan Pemilu Legislatif 2004**

Dari hasil rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilu Legislatif tersebut diketahui bahwa dari 1.734.455 pemilih dalam Provinsi Jambi yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 5 April

File:Umum/laporan pemilu legislatif

1

2004 adalah sebanyak 1.417.594 orang (81,73 %) sedang sisanya (yang tidak menggunakan hak pilihnya) adalah sebesar 18,27 %, yang terdiri dari :

- Suara untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi :  
=> Suara Sah : 1.286.307 (90,74%)  
=> Suara tidak Sah : 131.287 (9,26%)
- Suara untuk Calon Anggota DPD :  
=> Suara Sah : 1.213.540 (85,61%)  
=> Suara tidak Sah : 204.054 (14,39%)

Secara lebih terperinci hasil penghitungan suara tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILU TAHUN 2004  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)**

No. Urut.	Nama Calon Anggota DPD	Jumlah
1	Drs. H.A. Hasyim Hanafi	82,995
2	Hifni Hasan, SH	57,822
3	Zainul Chalikin	50,211
4	Nuzran Joher, S.Ag	137,018
5	Ismail Syafrudin, SP	69,925
6	Drs. H. Buchari Hasan	104,307
7	H.M Saman Chatib, SH	83,554
8	Muhammad Nasir	125,205
9	Drs. Ibrahim Lakoni	34,900
10	Ir. Arsyad	35,773
11	Drs. H. Hasan	113,379
12	Jaya Kasumantri, S.Pd	47,490
13	M. Chudori	37,539
14	Dra. Hj. Nyimas Ena, MM	125,548
15	Syahri Asy	16,733
16	Prof. Dr. H. Sulaiman Abdullah	91,141
	JUMLAH	<b>1,213,540</b>

**HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILU TAHUN 2004  
DPRD-PROVINSI JAMBI**

**DAERAH PEMILIHAN  
KOTA**

: JAMBI-1  
: JAMBI

No. urut calon	NAMA PARTAI & CALON	PEROLEHAN SUARA	
		CALON 3	PARPOL 4
<b>1</b>	<b>2</b>		
<b>1</b>	<b>Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI-Marhaenisme)</b>		1.107
1	Aflin, A.Md	446	
2	Dr. H. A. Thohir Suandy	142	
3	Gunilla	144	
<b>2</b>	<b>Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD)</b>		1.873
1	Roida Pane	586	
2	Emmy Sri Mauli Tambunan, SH	565	
<b>3</b>	<b>Partai Bulan Bintang (PBB)</b>		7.256
1	Dr. H. Zainul Imron	2.104	
2	M.Zen, SH, MH	930	
3	M.Rifa'i	476	
4	Hasan Basri Sahib, SH	409	
5	Ir.M. Riva'i	260	
6	Faroha	198	
7	Khairun Najwa, S.Sos	260	
<b>4</b>	<b>Partai Merdeka</b>		1.950
1	SH Sulaemi	665	
2	Dr. Buhasan Rachman	209	
3	Hj. Manna	187	
4	Zainal Makmur	197	
<b>5</b>	<b>Partai Persatuan Pembangunan (PPP)</b>		9.315
1	Dr. Arief Hassan	2.078	
2	Kol. (Purn) Suhard,SH	717	
3	Rifa'i Arbaen	588	
4	Nurhasnim	268	
5	Hj. Titik Suprihasri	816	
6	Tesnita	142	
<b>6</b>	<b>Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK)</b>		1.854
1	Riza,SE	443	
2	Rahmi, SH	134	
3	Enny Suratmi, SE	294	
4	Suyata Bahman Thaib	102	

File: Umum/laporan pemilu legislatif

3

No. urut calon	NAMA PARTAI & CALON	PEROLEHAN SUARA	
<b>7</b>	<b>Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB)</b>		2.089
1	Donny Pasaribu	579	
2	Nursyamiah	557	
<b>8</b>	<b>Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK)</b>		2.866
1	Mirza Haviz, SH, MM	1.245	
2	Noor Hadi Sagra Prawirsnegara, SE	398	
3	Lenni Marlina, SP	191	
<b>9</b>	<b>Partai Demokrat</b>		33.381
1	Eddy Haryanto, SH	11.269	
2	Leonny M.L. Sandy B.	8.435	
<b>10</b>	<b>Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP-Indonesia)</b>		4.073
1	H.M. Hasbi, SH	1.895	
2	Hj. Nurani Mugi Ahmad	609	
3	Abdul Aziz Thaib	198	
4			

<b>10</b>	<b>Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP-Indonesia)</b>		4.073
1	H.M. Hasbi, SH	1.895	
2	Hj. Nuraini Mugni Ahmad	609	
3	Abdul Aziz Thaib	198	
4	Sardana	208	
<b>11</b>	<b>Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)</b>		
<b>12</b>	<b>Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI)</b>		1.259
1	Tri Hartaty, ST	685	
<b>13</b>	<b>Partai Amanat Nasional (PAN)</b>		40.379
1	H. Chainul Naim, M. Anik, SH	14.317	
2	Syaifi Sofyan, SH	6.075	
3	Dedy Dewad	3.182	
4	Solikhahun, SE	1.981	
<b>14</b>	<b>Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)</b>		8.059
1	H. Libran, SE	1.355	
2	Desi, MS	1.476	
3	Candra Jaya, SP	693	
4	Rudi Ardiansyah, SH	924	
5	Mdrawati	376	
<b>15</b>	<b>Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)</b>		4.315
1	M. Indrawan Husaki, SP	1.040	
2	Emelda Raudhali, ST.MPd	456	
3	KH. Muzakir, BA	830	

File:Umum/laporan pemilu legislatif

4

No. urut calon	NAMA PARTAI & CALON	PEROLEHAN SUARA	
4	A. Thalib, SH	163	
5	Suhaimi Ja'far	161	
6	Novitalisah Aris Tanti, AMd	79	
<b>16</b>	<b>Partai Keadilan Sejahtera (PKS)</b>		14.774
1	Henri Maszykur	4.516	
2	Tursaman	984	
3	Raili Nasution	785	
4	Sri Rahayu, SE	2.489	
5	Hermaniyah, SE	836	
6	Iskandar Purnama, SP	491	
<b>17</b>	<b>Partai Bintang Reformasi (PBR)</b>		4.675
1	Drs. Jehrizen	895	
2	Stamat Priyadi	450	
3	Hj. Rostaini MGR, BA	684	
4	Taufik Hidayat, S.Pd	438	
5	Nyimas Nurhayani, D	450	
<b>18</b>	<b>Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)</b>		19.366
1	H. Suwarno Soerinta	3.326	
2	Kosasih Joesman	1.506	
3	Hotman P. Stanggang, SH	1.610	
4	Heryono, SE	952	
5	Sunarti	2.114	
6	dr. HR. Bambang Priyanto	1.199	
7	Dorni Sefrini	211	
8	Drs. Answari Achmad, MDP	366	
<b>19</b>	<b>Partai Damai Sejahtera (PDS)</b>		7.429
1	Ir. FDP. Hutabarat	3.114	
2	Edwin Budianto, SH	1.374	
3	Deddy Dusherman	336	
4	Elizabeth Tjahjadmawan, S.Si	660	

<b>19</b>	<b>Partai Damai Sejahtera (PDS)</b>		<b>7.429</b>
1	Ir. FDP, Hutabarat	3.114	
2	Edwin Budianto, SH	1.374	
3	Decky Dusherman	336	
4	Elizabeth Tjahjadamawan, S.Si	660	
<b>20</b>	<b>Partai Golongan Karya (Golkar)</b>		<b>50.768</b>
1	H. Zoerman Manop	13.418	
2	H. Muhammad Saman		
3	H.A. Rahman Albani, S.Ag	3.350	
4	Ir. BH. Tampubolon	2.421	
5	Hj. Asiah AK, Djuwainy	2.853	
6	H. Abdulllah Syargawi Ail, B.Sc	2.250	
7	Kemas Farouq	1.579	
8	Petrus Hilman Dapot-Tuah Purba	872	
9	Dra. Malmaznah	759	

File:Umum/laporan pemilu legislatif

5

No. urut calon	NAMA PARTAI & CALON	PEROLEHAN SUARA	
10	Syaiful Effendi	473	
<b>21</b>	<b>Partai Patriot Pancasila</b>		<b>2.685</b>
1	Effendi Hatta	1.451	
2	Indra Armendans, SH	255	
3	Ir. Paul Andre Marisi	141	
4	Kusnadi	75	
5	Nurlena, SE	82	
<b>22</b>	<b>Partai Sarikat Inddonesia (PSI)</b>		<b>1.197</b>
1	H. Muhammad Yusuf Husin, SH	355	
2	KMS, Firdaus	102	
3	Joko Supriyanto, S.Ag	134	
4	Wahyu Diana, SE	69	
5	Eva Haryani, A.Md	50	
6	Ihwandani	32	
7	Ir. Abdul Karim	14	
<b>23</b>	<b>Partai Persatuan Daerah (PPD)</b>		<b>3.162</b>
1	Drs. Sufiani	759	
2	Supianto, S.Sos	416	
3	Hj. Hincipah, BBA	413	
4	M. Amin Muslim, SH	306	
<b>24</b>	<b>Partai Pelopor</b>		<b>826</b>
1	Drs. M. Saleh Marzuki	267	
2	Drs. Sutrisno	82	
3	Drs. M. Saleh Rifai	79	
4	Margo Pattiradjawane	45	
	<b>JUMLAH</b>	<b>135.625</b>	<b>224.658</b>

Sumber: Kpu Batanghari

Lampiran 9. Koran Jambi Ekspres dan Independent 31 Mei 1999

# Partai Golkar wujudkan masyarakat madani

DALAM kehidupan masyarakat madani terdapat keseimbangan antara efektivitas pengawasan sosial atas dasar pelaksanaan kebebasan-kebebasan asasi terutama kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat di satu dan tanggungjawab asasi atas dasar kewajiban asasi hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, pada sisi yang lain. Pendapat apapun dalam masyarakat adalah berharga.

Karena itu menurut ketua DPD TKI Jambi H Zainuddin ZA BBA, dalam masyarakat harus diciptakan suasana kebebasan menyatakan pendapat, lisan atau tulisan, termasuk dalam bentuk kebebasan pers, disamping kebebasan berserikat dan berkumpul. Singkatnya, Golkar mencita-citakan masyarakat mandiri, demokratis, egaliter dan terbuka dimasa mendatang.

Tentang pandangan Golkar tentang masa depan, disebutkan, bahwa visi dan misi Golkar

merupakan manifestasi komitmen dan kesungguhan Golkar untuk membangun masyarakat yang mandiri, adil, terbuka dan demokratis atas dasar sendi-sendi masyarakat madani (civil society). Keadilan adalah nilai *Ilahi* yang secara mutlak harus diwujudkan dalam masyarakat.

Karena itu, para pendiri negara (founding fathers) kita telah dengan bijaksana menetapkan bahwa tujuan kita bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pandangan yang diskriminatif dan tidak adil terhadap suatu kelompok tertentu harus dihapuskan dari segenap masyarakat kita dan diganti dengan pandangan yang diliputi oleh semangat kekeluargaan, kebersamaan dan persaudaraan sejati antar warga negara. Keterbukaan adalah nilai kemanusiaan hakiki yang merupakan nafas dari gerakan reformasi. Atas

dasar pandangan keterbukaan tersebut, kita harus menciptakan sistem sosial politik yang tembus pandang (transparan) dengan struktur dan proses politik yang dapat secara efektif benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat.

Atas dasar kesadaran yang mendalam akan nilai keadilan dan reformasi untuk menata kembali sistem sosial, politik, ekonomi dan hukum. Maka partai Golkar akan mengembangkan pola hubungan sosial yang lebih harmonis dan dilandasi oleh semangat persamaan manusia.

Kepeloporan Golkar dalam menegakan kehidupan politik nasional yang demokratis dibuktikan dalam bentuk dukungan aktif dan kritis atas dasar agenda reformasi politik yang diarahkan untuk melakukan serangkaian koreksi terencana, melembaga dan berkesinambungan terhadap seluruh penyimpangan yang telah terjadi dalam bidang politik, ekonomi dan hukum. Sasarannya adalah agar kita dapat bangkit kembali dalam suasana yang lebih terbuka lebih teratur dan demokratis.

Pengendalian reformasi akan dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan menjunjung tinggi asas kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia dalam rangka persatuan dan kesatuan.

Menyikapi situasi saat ini, dikatakannya, krisis yang tengah melanda Indonesia, berawal dari krisis moneter dan berkembang menjadi krisis ekonomi, politik dan hukum yang pada hakikatnya bersumber dari krisis kepercayaan, moral dan etika dengan segala dampaknya perlu segera diatasi dengan langkah-langkah penanggulangannya agar kehidupan masyarakat dapat pulih kembali dalam waktu yang relatif singkat. \*\*\*

No. OPP	DPK-RI	DPD-IPKD-II	24. PK	1.487	1.866	1.893
1. PSB	443	413	25. PARTAI NU	1.214	1.315	1.226
2. KRISHNA	597	650	26. PNI FRONT M	517	561	571
3. PNI-SUPER	462	433	27. IPKI	317	369	303
4. PADI	271	302	28. PR	313	388	383
5. KAMI	305	376	29. PID	131	129	96
6. PUI	319	710	30. PNI-MASSA M	217	246	250
7. PKU	285	276	31. MURBA	72	109	156
8. MASYUMI R	513	543	32. PDI	11.733	655	638
9. PPP	16.551	15.413	33. GOLKAR	45.779	56.674	56.778
10. PSI	748	735	34. PP	2.525	2.591	2.464
11. PDI-P	75.490	69.717	35. PKB	2.902	4.513	3.389
12. PAY	366	269	36. PUDI	794	343	365
13. PKM	136	128	37. PBN	695	584	568
14. PDKB	277	292	38. MKGR	232	266	270
15. PAN	17.179	15.518	39. PDR	370	505	380
16. PRD	117	90	40. PCD	371	309	327
17. PSI 1905	153	139	41. PKP	5.194	5.271	5.301
18. PKD	92	131	42. PSPSI	923	176	123
19. PILAR	150	188	43. PHBI	136	124	138
20. PARI	430	300	44. PBI	1.055	770	783
21. MASYUMI	2.278	1.866	45. SUNI	220	203	210
22. PBB	5.205	5.663	46. PND	144	483	229
23. PSP	263	187	47. PUMI	86	97	123
			48. PPI	401	430	579

**Besok, PPD I kunker ke daerah**

Jambi, Ind  
Besok, Sabtu (14/6), PPD I  
Jambi melakukan kunjungan kerja  
kunker ke daerah-daerah tingkat  
II di Provinsi Jambi.

Setembara menerima laporan yang  
disampaikan Kandi 541, anggota  
PPD I wakil PDI Perjuangan  
Jambi telah terjadi kunjungan ke

PPS ke PPK dan PPD II di  
daerah-daerah tingkat II di Provinsi  
Jambi.

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Lampiran 10. Koran Jambi Ekspres dan Independent 4 Juni 1999



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Lampiran 12. Koran Jambi Ekspres dan Independent 8 Juni 1999

# TPS ramai, kota Jambi lengang

□ Kantor dan fasilitas vital dijaga ketat

Jambi 14  
Niat masyarakat kota Jambi untuk mewujudkan Indonesia baru betul-betul menjadi kenyataan. Bukannya hajat akbar Panitia pertama era reformasi yang digelar kemarin (7/6) hampir mayoritas warga kota Jambi melakukan dengan mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS), sehingga wajah kota Jambi biasanya ramai. Berubah total, sepi.

Kondisi ini memang beda dari pemilu sebelumnya. Para warga tidak saja ikut menyumbangkan suara, tapi juga menyaksikan penghitungan suara. Sebab, mereka tidak mau dikritik seperti pemilu sebelumnya, meneliti ikut memantau dan melihat langsung seorang pemilih.

Betapa masyarakat di tempat TPS ini membuat pusat-pusat ramatan seperti pasar swalayan ngadai di kota Berada tak dilinis tidak melakukan aktivitas. Bahkan juga pasar-pasar induk ng ada juga tampak lengang. Sorotan toko-toko tampaknya matuhi anjuran, hari "H" ini merupakan libur nasional. Kondisi lengangnya kota pada cak pesta demokrasi juga tak di jalan-jalan protokol, ama jalan Sudirman, jalan n. Perdana Kusuma, H. Mar-Sultan Thaha, Husni Thamri,

berjualan sangat sepi, hanya terlihat satu, dua orang pedagang. Makanya saya pulang cepat," ungkap Ibu Sulastri yang setiap hari ke pasar subuh kepada *Independent* kemarin.

Sedangkan kepiasan di pasar Talangbajar tidak jauh berbeda dengan pasar Angsoduo, karena sehari sebelum hari H, banyak pedagang yang memberitabukan kepada pembeli bahwa pada saat pemilu mereka tidak akan berjualan.

Menurut keterangan ibu-ibu pedagang mereka sengaja meliburkan diri tidak berjualan, karena pemilu. Sebab jika berjualan, otomatis sibuk sibuk dan dari sisi bisnis juga belum tentu menguntungkan. perhitungan para pedagang, suasana pasar sepi.

"Wah, sekali-kali Ibu. Rugi ngak apa-apa yang jelas kita ikut menyumbangkan suara untuk perbaikan nasib. Sebab, kata orang pemilu hari ini menentukan nasib bangsa," ujar Ibu Aminah salah seorang pedagang di Pasar Angsoduo. Rustam dan Edi pedagang yang biasa mangkal di Terminal Rawasari juga menilai sama. (devicr05dasy/ree)



Puncak pelaksanaan pesta demokrasi di Jambi merubah wajah kota Jambi. Hiruk-pikuk yang senantiasa mewarnai kota Berada, kemarin tenang dan lengang. Toko tutup, banyak warga menghentikan aktivitas rutinitasnya.

**Lampiran 11. Dokumentasi Penulis dengan narasumber**



**Dokumentasi pribadi dengan bapak Wein Arifin selaku Ketua Bawaslu Pada tanggal 18 Desember 2024**

**Lampiran 12. Dokumentasi Penulis dengan narasumber**



**Dokumentasi pribadi dengan bapak Ansorullah selaku Dosen Ilmu Hukum (Ketua Pawanslu 2004) pada tanggal 09 Januari 2025**

**Lampiran 13. Dokumentasi Penulis dengan narasumber**



**Dokumentasi pribadi dengan bapak Deni Rahmat selaku Ketua KPU Kota Jambi pada tanggal 07 Februari 2025**